

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD)

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD)

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(R P J P D)**

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005 – 2025

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, maka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 1992 Nomor 115, TLNRI Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 1997 Nomor 68, TLNRI Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Musrenbang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005 – 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Musrenbang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005 – 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

Pasal 2

RPJPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penjabaran dari RPJPD ini akan ditindaklanjuti dalam RPJMD yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi dan program pembangunan daerah, Calon Kepala Daerah berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB III **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Oktober 2008



BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 16 Tahun 2008
TANGGAL : 27 Oktober 2008
TENTANG : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2008**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Purwakarta.....	I-2
1.1.2 Pengertian RPJPD Kabupaten Purwakarta.....	I-4
1.1.3 Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Purwakarta.....	I-4
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	I-5
1.3 Landasan Hukum.....	I-5
1.4 Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	I-6
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI	II-1
KONDISI UMUM DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi dan Analisis.....	II-1
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup...	II-1
2.1.2 Demografi.....	II-6
2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam.....	II-9
2.1.4 Sosial Budaya dan Politik.....	II-19
2.1.5 Prasarana dan Sarana Wilayah.....	II-33
2.1.6 Pemerintahan.....	II-37
2.2 Prediksi Kondisi Umum Kabupaten Purwakarta.....	II-38
2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup...	II-38
2.2.2 Demografi.....	II-39
2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam.....	II-40
2.2.4 Sosial Budaya dan Politik.....	II-44
2.2.5 Prasarana dan Sarana Wilayah.....	II-48
2.2.6 Pemerintahan Daerah.....	II-50
BAB III VISI, MISI, ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025.....	III-1
3.1 Visi Pembangunan.....	III-1
3.2 Misi Pembangunan.....	III-4
3.3 Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025.....	III-5
3.3.1 Arah Pembangunan Kabupaten Purwakarta.....	III-5
3.3.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025.....	III-10
BAB IV PENUTUP.....	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Prosentase APK Dan APM Kabupaten Purwakarta Tahun 2004-2006....	II-22
Tabel 2.2	Kondisi Bangunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2006.....	II-23
Tabel 2.3	Jumlah Lulusan, Mengulang Dan Putus Sekolah Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2006.....	II-24
Tabel 2.4	Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2006.....	II-26
Tabel 2.5	Inventarisasi Jalan Kabupaten Tahun 2005-2006.....	II-35
Tabel 2.6	Kondisi Jalan Kabupaten Beraspal Tahun 2005-2006.....	II-35
Tabel 2.7	Banyaknya Armada Angkutan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2006.....	II-36

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1 Perkembangan Angka Capaian RLS dan IPM
Kabupaten Purwakarta Tahun 2001-2006.... II-21
- Grafik 2.2 Perkembangan AMH dan IPM
Kabupaten Purwakarta Tahun 2001-2006.... II-22



Perda RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Era desentralisasi daerah di Indonesia dijalankan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sejak itu berkembang konstelasi baru dalam pembangunan, yaitu daerah menjadi lebih bersifat otonom dan pembangunan desentralistik. Kewenangan pada berbagai tingkatan pemerintahan kemudian ditentukan. Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten dan Kota mendapat kewenangan yang sangat luas berkaitan dengan pembangunan daerahnya. Untuk itu diperkuat dengan dukungan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Kabupaten di Indonesia juga bergerak dalam konstelasi tersebut. Dinamika di dalam masyarakat semakin tampak nyata dan menuntut perhatian lebih dari Pemerintah Daerahnya. Permasalahan di masyarakat sekarang menjadi semakin dekat dengan urusan pemerintah daerah.

Pada tanggal 5 Oktober tahun 2004 dikeluarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan hal itu maka daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk mendukung tujuan propinsi dan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui Visi Indonesia tahun 2005-2025 adalah **Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil** dengan 7 Misi, yaitu:

1. Mewujudkan Daya Saing Bangsa
2. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
3. Mewujudkan Indonesia Aman, Damai dan Bersatu
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan
5. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari
6. Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan Berbudaya
7. Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional

Dalam rangka mendukung, mengisi dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Indonesia tersebut, maka Kabupaten Purwakarta menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjangnya dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Penyusunan RPJP ini dilakukan dalam tahapan proses partisipatif dari masyarakat secara *bottom up* melalui mekanisme Musrenbang Jangka Panjang Daerah (Musrenbang RPJPD).

1.1.1. Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Purwakarta

Purwakarta sebagai nama tempat (pemukiman) mulai muncul dalam panggung sejarah pada awal dekade ketiga abad ke-19. Sejak kemunculannya, Purwakarta langsung eksis dengan kedudukan penting, karena Purwakarta didirikan sebagai pusat pemerintahan, yaitu ibukota baru Kabupaten Karawang. Hal itu berarti Purwakarta termasuk ke dalam kelompok salah satu kota tua di Jawa Barat.

Dalam perjalanan sejarahnya, Purwakarta selalu memiliki kedudukan penting dalam bidang pemerintahan, yaitu sebagai pusat-pusat pemerintahan kabupaten, afdeling, distrik (kewedanan), kecamatan, bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan keresidenan. Hal itu dimungkinkan oleh letak geografi Purwakarta yang cukup strategis, baik bagi jalannya pemerintahan maupun bagi kehidupan sosial ekonomi. Kondisi itu ditunjang pula oleh potensi daerah Purwakarta, baik potensi alam maupun potensi hasil bumi dan hasil lain yang diusahakan oleh masyarakat. Hal-hal itu pula yang menjadi pertimbangan Pemerintah RI (atas dasar aspirasi masyarakat) pada pertengahan abad ke-20 menjadikan daerah Purwakarta sebagai sebuah kabupaten, lepas dari wilayah induknya (Karawang).

Letak geografi Purwakarta yang strategis, juga menyebabkan daerah itu memiliki kedudukan penting, baik dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan anasir asing, maupun dalam upaya mengisi kemerdekaan. Pada masa revolusi kemerdekaan, Purwakarta merupakan salah satu basis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Dalam upaya mengisi kemerdekaan dan memajukan kehidupan bangsa dan negara, Purwakarta adalah salah satu daerah pilot proyek pembangunan nasional yang berlangsung hingga sekarang.

Pada tanggal 20 Juli 1831, tercatat sebagai sejarah lahirnya nama Purwakarta dan keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah kepindahan ibu kota Kabupaten Karawang dari Wanayasa ke Sindangkasih. Hal ini terjadi ketika Kabupaten Karawang diperintah oleh Bupati R.A. Suriawinata (1829-1849).

Setelah Bupati R.A. Suriawinata menetap di Sindangkasih, sebagian dari daerah itu segera dibangun menjadi ibukota baru Kabupaten Karawang.

Dapat dipastikan, pembangunan kota itu didasarkan pada pola kota tradisional, dengan ciri utama alun-alun sebagai pusat kota, pendopo di sebelah selatan alun-alun, masjid agung di sebelah barat alun-alun, dan rumah keluarga bupati di sebelah timur alun-alun. Pola kota dengan ciri-ciri tersebut memang merupakan pola kota-kota lama di Jawa Barat khususnya dan di Pulau Jawa umumnya.

Sindangkasih sebagai ibukota Kabupaten Karawang diresmikan berdasarkan besluit (surat keputusan) pemerintah kolonial tanggal 20 Juli 1831 nomor 2, dengan nama baru Purwakarta. Akan tetapi, nama Sindangkasih tetap digunakan, yaitu sebagai nama distrik di wilayah ibu kota kabupaten (sekarang menjadi nama Kelurahan). Surat keputusan tersebut adalah sumber akurat dan primer serta mengandung makna yuridis formal. Oleh karena itu, tanggal 20 Juli 1831 merupakan fakta sejarah tentang berdirinya kota/daerah bernama Purwakarta. Ketika Purwakarta diresmikan sebagai ibu kota kabupaten, besar kemungkinan wilayah kota itu masih kecil.

Mengenai asal-usul dan arti nama Purwakarta terdapat beberapa versi. Versi umum menyatakan nama itu berasal dari kata purwa dan karta dalam bahasa Sansakerta. Purwa berarti yang pertama, karta berarti aman tentram dan tertib atau ramai. Akan tetapi penjelasan mengenai arti kedua kata itu berbeda antara satu versi dengan versi lain. Ada versi yang menghubungkan arti Purwakarta dengan perang Cina Makao. Versi lain menghubungkan kata itu dengan orang bernama Purbasari, salah seorang penasehat/kepercayaan Bupati R.A. Suriawinata yang besar peranannya dalam mencari tempat untuk ibu kota baru Kabupaten Karawang. Menurut versi itu, kara purwa berasal dari kata purba, nama bagian depan dari Purbasari. Versi mana yang paling mendekati kebenaran, memerlukan penelitian secara khusus.

Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan Tahun 1949, dan pada Tanggal 29 Januari 1949 melalui Surat Keputusan Wali Negara Pasundan Nomor : 12, Kabupaten Karawang dipecah menjadi dua wilayah. Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kotanya di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, diatur penetapan Kabupaten Purwakarta yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem, dan Purwakarta.

Pada Tahun 1968, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, ditetapkan pembentukan Kabupaten Purwakarta yang wilayahnya meliputi Kecamatan

Purwakarta, Kecamatan Plered, Kecamatan Wanayasa, dan Kecamatan Campaka dengan jumlah desanya 70 desa termasuk empat desa yang berasal dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur. Setelah mengalami perkembangan kewilayahan, saat ini Kabupaten Purwakarta memiliki 17 kecamatan, 183 desa serta 9 kelurahan.

1.1.2 Pengertian RPJPD Kabupaten Purwakarta

RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen RPJP Daerah adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

RPJPD Kabupaten Purwakarta adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

1.1.3 Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Purwakarta

Dalam upaya penyusunan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yang dapat mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, perlu dilaksanakan tahapan sebagai berikut. Pertama, penyiapan rancangan RPJPD, kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Kedua, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap rancangan RPJPD. Ketiga, penyusunan rancangan akhir RPJPD, seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJPD, menjadi rancangan akhir RPJPD. Keempat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public dalam proses penyusunan RPJPD maka dalam proses penyusunannya dilakukan tahapan konsultasi publik yang melibatkan semua pihak yang terkait. Kelima, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Purwakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan daerah dan memberikan kontribusi bagi tujuan nasional dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJP ini adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan satu pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- b) Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi ke depan.
- c) Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan lima tahunan daerah.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Ideal RPJP adalah Pancasila dan Landasan Konstitusionalnya adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Musrenbang Daerah.

1.4. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJP ini menguraikan tentang kondisi umum daerah dan atas dasar itu ditetapkan arah umum pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.
2. Penyusunan RPJPD mengacu pada arah pembangunan RPJP Propinsi dan RPJP Nasional, selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJM tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- b. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- c. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 disusun menurut tata urutan dan sistematika sebagaimana diatur berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Musrenbang Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

2. BAB II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

- 2.1 Kondisi dan Analisis
 - 2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - 2.1.4. Sosial Budaya dan Politik
 - 2.1.5. Prasarana dan Sarana Wilayah
 - 2.1.6. Pemerintahan
 - 2.1.7. Data lainnya yang mendukung dan dianggap penting sebagai kekuatan daerah.
- 2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah

**3. BAB III : Visi, Misi, Arah, Tahapan
dan Prioritas Pembangunan Daerah**

- 3.1 Visi Pembangunan
- 3.2 Misi Pembangunan
- 3.3 Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

4. BAB IV : Penutup



BAB 2

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

2.1. Kondisi Dan Analisis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 didasarkan pada kondisi dan situasi eksisting, tuntutan dan ekspektasi masyarakat, kemampuan yang dimiliki, serta dilandasi semangat demokratis, transparan, berkeadilan, efisien dan efektif. Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi sampai saat ini harus dapat dipecahkan secara gradual dengan penyusunan strategi dan kebijakan yang bersifat inkremental dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, namun tetap dalam penyelesaiannya menyentuh kepada persoalan-persoalan substansial yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di masa yang akan datang.

Pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi Bidang : **Geomorfologi dan Lingkungan Hidup, Demografi, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Politik, Prasarana dan Sarana Wilayah, dan Bidang Pemerintahan.** Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan Kabupaten Purwakarta 20 tahun ke depan melalui penetapan pola kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang yang tepat dan akurat.

2.1.1 Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup

• Kondisi Geomorfologi

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak diantara 107°30' – 107°40' BT dan 6°25' – 6°45' LS. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah: Bagian Barat dan sebagian wilayah Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang; Bagian Utara dan sebagian wilayah Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang; Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat; Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Kabupaten Purwakarta berada

pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu Jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, dan Babakancikao. Wilayah Bagian Timur mencakup Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Purige. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur, Sukatani dan Sukasari, dan Bagian Selatan wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Darangdan dan Bojong.

Luas Wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 97.172 Ha, atau 971,72 km², dengan jenis penggunaan tanah yaitu berupa permukiman, industri, perdagangan, hutan lindung, hutan produksi, tanaman pangan, perkebunan, danau dan lainnya. Pemanfaatan lahan yang terbesar pada tahun 2006 adalah untuk tanaman tahunan/perkebunan, yaitu sebesar 28,62% sedangkan yang terkecil adalah pemanfaatan lahan untuk Kawasan Pariwisata yaitu sebesar 0,26%.

Dilihat dari Aspek Topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu:

1. Wilayah Pegunungan.

Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 - 2.036 m dpl, dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah;

2. Wilayah Perbukitan dan Danau.

Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 - 1.100 m dpl, dan meliputi 9,88 persen danau dan 23,92 persen dari total luas wilayah;

3. Wilayah Dataran.

Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 m dpl, dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

Kabupaten Purwakarta termasuk pada zona iklim tropis, dengan rata-rata curah hujan 3.093 mm/tahun dan terbagi ke dalam 2 wilayah zona hujan, yaitu zona dengan suhu berkisar antara 22°-28° C dan zona dengan suhu berkisar 17° -26° C.

Zona mata air di Kabupaten Purwakarta yang berpengaruh terhadap keseimbangan air permukaan wilayah regional terdapat di Gunung Burangrang dan Pasir Kutangandak di Kecamatan Wanayasa, Sanggabuana di Kecamatan Sukasari, Gunung Parang di Kecamatan Tegalwaru dan Pasir Madang di Kecamatan Campaka.

Zona air tanah di Kabupaten Purwakarta merupakan zona air tanah sedang sampai dangkal, terdapat di wilayah Sungai Cikao Kecamatan

Purwakarta, Plered dan Campaka, serta zona air tanah dalam terdapat di wilayah Kecamatan Darangdan dan Wanayasa. Zona air permukaan berupa air sungai dan air genangan (situ).

Sungai terbesar yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah Sungai Citarum. Sungai kecil meliputi Sungai Cikao, Sungai Ciharang dan Sungai Cilamaya. Air genangan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah Waduk Ir. H. Juanda dan sebagian Waduk Cirata (sebagian areal Waduk Cirata berada pada wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat).

Kondisi Geologi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, berupa: batu pasir, batu gamping, batu lempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglomerat dan napal). Batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan tersebut umumnya bertebaran di sebelah Barat Daya wilayah Kabupaten Purwakarta.

Jenis batuan napal, batu pasir kuarsa merupakan batuan yang tertua di Kabupaten Purwakarta dengan lokasi sebaran di tepi Waduk Ir. H. Juanda. Batu lempung yang berumur lebih muda (*miosen*) tersebar di wilayah Barat Laut Bagian Timur Kabupaten Purwakarta. Endapan gunung api tua yang berasal dari Gunung Burangrang, Gunung Sunda berupa tuf, lava andesit basalitis, breksi vulkanik dan lahar. Di atas batuan gunung api tua diendapkan pula hasil erupsi gunung api muda yang terdiri dari batu pasir, lahar, lapili, breksi, lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, dan lava scoria.

Mengacu pada peta tinjauan skala 1 : 250.000 (CPT Bogor), jenis tanah yang ada di Kabupaten Purwakarta terdiri dari : aluvial, latosol, andosol, grumosol, podsolik dan regosol. Peruntukan penggunaan lahan diantaranya digunakan untuk perkampungan/ perkotaan, sawah, kebun campuran, perkebunan, tegalan, hutan, padang rumput, alang-alang dan situ/waduk. Pola penggunaan lahan perkampungan/perkotaan di Kabupaten Purwakarta bersifat linier sepanjang ruas-ruas jalan negara, propinsi dan kabupaten. Di samping itu penggunaan perkampungan/ perkotaan terutama terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Purwakarta, Jatiluhur dan Plered. Penggunaan lahan berupa sawah tersebar hampir pada semua kecamatan yang ada, begitu pula dengan penggunaan lahan berupa kebun campuran. Lahan perkebunan terletak di Kecamatan Darangdan, Wanayasa, Kiara Pedes, Bojong, Campaka, dan Jatiluhur, sedangkan tegalan terdapat di Kecamatan Sukatani, Sukasari dan Campaka. Lahan hutan sebagian besar terletak di Kecamatan Campaka, Wanayasa, Pasawahan, Jatiluhur dan Maniis. Penggunaan lahan

untuk kawasan Industri terletak di Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Babakan Cikao, Bungursari, Campaka dan Cibatu.

• **Kondisi Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah (hidro-orologis), keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia.

Secara umum kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun masih dapat dikatakan relatif baik. Hasil pemantauan terhadap kualitas udara di 15 (lima belas) lokasi yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa hanya 2 (dua) lokasi yang mempunyai nilai NO_x , SO_2 , CO , H_2S , debu dan Pb yang cukup tinggi. Kedua lokasi yang dimaksud adalah Gerbang Tol Cikopo dan Pasar Jum'at. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara pada sebagian besar Wilayah Kabupaten Purwakarta masih berada di bawah batas ambang yang bisa ditoleransi. Sementara kedua lokasi di atas merupakan lokasi yang memiliki aktivitas kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Arus lalu lintas yang besar beserta kemacetan yang menyertainya disinyalir menjadi sumber emisi gas buang utama dibandingkan aktivitas lainnya (industri maupun rumah tangga).

Karakteristik hidrologis di Kabupaten Purwakarta secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Kualitas air permukaan pada bagian hulu umumnya sangat baik. Pada bagian ini air permukaan tampak jernih dan mempunyai rasa alami. Namun, seiring perjalanan menuju hilir, air tersebut mulai terkontaminasi limbah rumah tangga, industri dan aktivitas limbah kimiawi pertanian. Oleh karena itu, hasil pemantauan kualitas air menunjukkan kadar COD Sungai Citarum sebagai salah satu sungai utama di Kabupaten Purwakarta semakin ke hilir semakin tinggi.

Beberapa permasalahan pokok di bidang lingkungan hidup yang sekarang masih dihadapi dapat digambarkan sebagai berikut ini:

1. Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai)

Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS. Kerusakan DAS tersebut juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaan yang masih lemah. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya

cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga.

2. Pertambangan dan galian yang merusak lingkungan

Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan.

3. Pencemaran air semakin meningkat

Limbah rumah tangga, industri, dan pertanian merupakan penyumbang terbesar dari pencemaran air. Pengawasan terhadap kualitas air belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Hal yang paling nampak yaitu air limbah rumah tangga dan beberapa industri yang membuang limbahnya ke sungai, sehingga membahayakan kelestarian ekosistem sungai, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

4. Kualitas udara yang semakin menurun

Senyawa yang perlu mendapat perhatian serius adalah partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx) dan sulfur dioksida (SO₂). Pencemaran udara utamanya disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, industri, kebakaran hutan, dan kurangnya tutupan hijau di perkotaan. Akibat perkembangan modernisasi, jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu kian bertambah, kondisi demikian pada akhirnya makin memperburuk kondisi lingkungan, terutama menyangkut kualitas udara.

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan

Masyarakat umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan keserakahan.

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006 sebanyak 798.218 orang, atau mengalami peningkatan sebanyak 15.856 orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 yaitu sebesar 782.362 orang. Sehingga angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2006 yaitu sebesar 2,03%, kondisi ini mengalami perbaikan laju pertumbuhan sebesar 0,11% jika dibandingkan dengan angka capaian laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 yaitu sebesar 2,14%.

Selain akibat faktor pertumbuhan alami, perkembangan jumlah penduduk juga dipengaruhi oleh variabel migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Migrasi masuk yang cukup besar terjadi di daerah perkembangan wilayah Purwakarta, hal ini disebabkan oleh perkembangan pembangunan terutama pada sektor industri dan perdagangan, serta akibat pembangunan perumahan/pembangunan permukiman baru.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu Kecamatan Purwakarta. Kondisi demikian berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian di kecamatan tersebut, yang didominasi oleh sektor-sektor sekunder dan tersier, sehingga mengundang terjadinya migrasi masuk.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta, pada tahun 2006 komposisi penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan jenis kelamin, terbesar yaitu berjenis kelamin laki-laki sebanyak 398.507 orang, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 399.711 orang.

Berdasarkan data proyeksi BPS tahun 2006, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006 sebesar 550.155 jiwa atau 68,92% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur usia produktif jenis kelamin laki-laki sebesar 276.088 jiwa atau 69,28% dari total keseluruhan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk kelompok umur usia produktif berjenis kelamin perempuan sebesar 274.027 jiwa atau 68,56% dari keseluruhan total jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.

Komposisi penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat pendidikan, pada tahun 2006 penduduk tidak bersekolah berjumlah 190.839 jiwa atau 30,89%, penduduk berpendidikan SD/MI berjumlah 219.168 jiwa atau 35,48%, penduduk berpendidikan SMP/MTs berjumlah 97.797 jiwa atau 15,83%, penduduk berpendidikan SLTA/ sederajat berjumlah 61.757 jiwa atau 10,00%, penduduk berpendidikan SM Kejuruan berjumlah 25.382 jiwa atau 4,11%, penduduk berpendidikan DI/DII berjumlah 6.500 jiwa atau 1,05%, penduduk berpendidikan DIII/Sarmud berjumlah 7.735 jiwa atau 1,25%,

penduduk berpendidikan D IV/Universitas ke atas berjumlah 8.615 jiwa atau 1,39%

Di bidang kependudukan, permasalahan utama yang masih dihadapi Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Persebaran penduduk dan kepadatan penduduk yang tidak merata antar masing-masing kecamatan dengan kecamatan lain. Hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar masing-masing kecamatan. Kepadatan penduduk pada tahun 2005 mencapai 805 jiwa per Km², meningkat dibanding 2,03 % dibandingkan tahun 2004 sebesar 789 jiwa per Km². Kecamatan Purwakarta merupakan kecamatan dengan angka kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 5.790 jiwa per Km² dan kecamatan Sukasari sebagai kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk terendah yaitu 115 jiwa per Km². Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut di atas adalah bentuk struktur kota lama Purwakarta yang berpola ribbon city.
2. Dalam kurun waktu 10 tahun (1990-2000), rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Purwakarta adalah 2,28 % per tahun. Tanpa upaya dan usaha pemerintah daerah ke depan dapat dipastikan akan terus bertambah.
3. Angka Kelahiran dan Kawin Pertama yang masih cukup tinggi. Angka Kelahiran Kasar (CBR) dan usia kawin pertama menurut perhitungan BPS dan UNFPA adalah 22,93. dari perhitungan tersebut diperkirakan jumlah kelahiran di Kabupaten Purwakarta sebanyak 18.079 orang. Sedangkan untuk usia kawin pertama berdasarkan SUSEDA 2005 adalah sebagai berikut: ≤ 15 tahun sebesar 16,51 %, usia 16 tahun sebesar 16,79 %, usia 17-18 tahun sebesar 30,61 %, usia 19-24 tahun sebesar 30,80 % dan usia ≥ 25 tahun sebesar 5,29 % dari gambaran jumlah belum kawin 195,899 (31,79 %) dan kawin 378,356 orang (61,44%).
4. Peningkatan angka harapan hidup (AHH) yang terjadi dari tahun 2001 hingga 2006 dan tingginya angka kelahiran telah menciptakan perubahan struktur demografi. Konsekuensi dari perubahan struktur kependudukan tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk berusia muda (*younging population*) dengan struktur piramida penduduk positif di Kabupaten Purwakarta. Jika tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, kedepan dikhawatirkan dapat menimbulkan ledakan pengangguran.
5. Pada aspek demografi yang dialami selama ini adalah terkait dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah walaupun dari tahun ke tahun angka kepadatan penduduk semakin bertambah. Kepadatan penduduk pada tahun 2000 tercatat sebesar 710 jiwa per km², meningkat menjadi 821 jiwa per km² persegi pada tahun 2006.

6. Tingkat (migrasi sirkuler) ke Kabupaten Purwakarta relatif rendah dan di masa mendatang masih dimungkinkan terjadi peningkatan karena daya tarik Kabupaten Purwakarta bagi pendatang baru untuk tinggal (resettlement) dan beraktifitas seiring dengan perkembangan Ibu Kota DKI (tydal wave effect) Jakarta dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Purwakarta.
7. Prosentase penduduk yang bekerja berbanding jumlah pencari kerja dan angka pengangguran memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun walaupun dalam angka yang relatif kecil. Tahun 1996 prosentase penduduk yang bekerja sebesar 39,55 angka pengangguran sebesar 14.977 orang atau sebesar 3,1 persen dari total penduduk, pada tahun 2000 menjadi 16.011 orang atau sebesar 3,21 persen dari total penduduk, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 31.664 orang atau sebesar 6,1 persen dari total penduduk. Angka tersebut cukup tinggi untuk ukuran Kabupaten Purwakarta.
8. Pada Tahun 2003 tercatat pencapaian peserta KB baru berjumlah 20.362 aseptor; tahun 2004 menurun menjadi 18.021 aseptor dan terus mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 16.888 aseptor. Jumlah klinik KB tahun 2005 sebanyak 83 buah klinik KB, sedangkan jumlah Pos KB sebanyak 197 buah. Perlu menjadi perhatian bahwa jumlah Klinik KB yang dikelola oleh Dinas Kesehatan hanya berjumlah 39 buah jauh lebih kecil dibandingkan jumlah Klinik KB yang dikelola oleh pihak swasta berjumlah 42 buah sisanya milik ABRI.
9. Sedangkan untuk jumlah pencapaian KB Aktif di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2005 berjumlah 109.496 peserta (97,23%) dari target yang diinginkan yaitu 112.613 jauh lebih menurun dibandingkan tahun 2004 yaitu berjumlah 109.545 peserta (103,87) melebihi target yang ditentukan yaitu 105.463 peserta. Sedangkan pada tahun 2003 dengan target 104.926 hanya tercapai 104.618 peserta (99.71%).
10. Angka kemiskinan masih cukup tinggi, apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga, jumlah keluarga pra sejahtera menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta menurut hasil pemuktahiran data BKKBN sebanyak 68.615 KK. Terdiri dari 113.229 KK/ 43.606 jiwa Pra KS, KS 1 sebanyak 55.386 KK/191.476 jiwa. Berdasarkan pemuktahiran data PKPS BBM tahun 2004 tercatat 37.697 KK (18,50 %) dari total KK seluruhnya yang berjumlah 203.799 KK. Hasil pemuktahiran data sasaran keluarga miskin sudah mengikuti kesepakatan Ciloto tanggal 17-21 Februari 2003. Berdasarkan data tahun 2006 tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta sebanyak 205.707 jiwa. Angka ini mempunyai kecenderungan untuk naik dari tahun ke tahun khususnya mulai tahun 2005 hingga 2006,

sedangkan pada tahun 2002 hingga tahun 2004 mengalami sedikit penurunan.

2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

▪ Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi Makro Daerah

a.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data perkembangan PDRB menunjukkan bahwa perekonomian daerah paska titik kulminasi krisis multidimensional menunjukkan perkembangan melambat, namun cukup signifikan sebagai upaya konsolidasi proses produksi dan konsolidasi pasar. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2006 meningkat dari sebesar Rp. 7,972 Trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp.8,750 Trilyun. Sedangkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000, juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp.5,305 Trilyun menjadi Rp. 5,489 trilyun pada tahun 2006.

a.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perkembangan ekonomi Kabupaten Purwakarta sepanjang Tahun 2001 hingga 2006 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Namun secara absolut dalam periode yang sama selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu mengalami pertumbuhan diantara 3 hingga 4 persen. Pada tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi Purwakarta tercatat sebesar 4,00 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama selang waktu 4 tahun, namun pada tahun 2003 mengalami sedikit penurunan dengan besaran 3,01 persen. Turunnya pertumbuhan tahun 2003 dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh turunnya nilai tambah sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor listrik dimana kemarau panjang dan kekeringan merupakan penyebab utama. Ditambah lagi dengan menurunnya kegiatan beberapa sub sektor industri pengolahan yang dominan yaitu tekstil dan produk tekstil yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi agak tertahan.

Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan menjadi 3,72 persen. Penyebab utama adalah naiknya nilai tambah sektor konstruksi yang mencapai 57,47 persen. Hal ini terkait dengan direalisasikannya pembangunan jal tol Cipularang. Kemudian pada tahun 2005 laju pertumbuhan ini sedikit menurun menjadi 3,51 persen. Hal ini disebabkan oleh

sektor konstruksi mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar - 8,17 persen, penurunan ini dikarenakan hampir selesainya pembangunan jalan tol Cipularang. Selanjutnya pada tahun 2006, Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 3,46 persen. Penurunan ini juga disebabkan oleh sektor bangunan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -13,74 persen yang sebagian besar disebabkan dari meningkatnya sektor perdagangan/retail, sektor transportasi, serta sedikit kontribusi dari sektor konstruksi.

Mulai meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi sekunder dan tersier menunjukkan bahwa perekonomian Purwakarta melambat, tapi pasti bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

a.3 Pendapatan Perkapita Penduduk

Ukuran lain yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk adalah besaran PDRB perkapita atas dasar harga berlaku. PDRB perkapita merupakan gambaran kasar dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah. Gambaran kemakmuran tersebut dikatakan kasar karena pada kenyataannya produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk wilayah yang bersangkutan. PDRB per kapita merupakan nilai tambah yang dihasilkan dibagi dengan jumlah penduduk.

Kabupaten Purwakarta pada kurun waktu 2002-2006 selalu mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2002 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Purwakarta tercatat 8,047 juta rupiah, sedangkan di tahun 2003 meningkat sebesar 8,438 juta rupiah. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2006 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Purwakarta tercatat sebesar 11,083 juta rupiah.

a.4 Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Kemampuan daya beli masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti faktor pendapatan, Inflasi dan pola konsumsi masyarakat. Pendapatan itu sendiri dipengaruhi oleh pendidikan dan ketenagakerjaan (lapangan pekerjaan, tingkat upah dan produktivitas) maupun tingkat inflasi. Sedangkan tingkat inflasi dipengaruhi oleh harga (barang dan Jasa) serta kebijakan pemerintah.

Tingkat daya beli masyarakat di Kabupaten Purwakarta yang dihitung berdasarkan pengeluaran konsumsi perkapita riil pada tahun 2002 baru mencapai Rp. 540.740,-, kemudian tahun 2003 menjadi Rp. 541.520,- dan pada tahun 2005 mencapai Rp. 548.240,-, selanjutnya pada tahun 2006 menurun menjadi Rp. 549.230,-. Salah satu alasan peningkatan ini adalah adanya kenaikan pendapatan perkapita masyarakat pada periode yang sama, sehingga menyebabkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum.

Besarnya peningkatan daya beli masyarakat tidak sama dengan besarnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan PDRB perkapitanya, hal ini disebabkan selain adanya perbedaan metode penghitungan juga merupakan dua sisi yang berbeda, di mana PDRB perkapita dilihat dari sisi pendapatan (produksi) secara bruto sedangkan daya beli diukur dari sisi pengeluaran. Namun secara teori dan empiris peningkatan dua perubah ini diharapkan akan sejalan, dengan harapan bahwa peningkatan PDRB perkapita akan meningkatkan daya beli masyarakatnya.

a.5 Laju Inflasi

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (*demand*) dengan penyediaan (*supply*).

Laju inflasi Kabupaten Purwakarta pada tahun 2002 sebesar 9,13, tahun 2003 sebesar 4,05, tahun 2004 sebesar 6,40, tahun 2005 sebesar 17,11 dan tahun 2006 sebesar 6,60. Flutuasinya tingkat inflasi di Kabupaten Purwakarta pada 5 tahun terakhir terkait dengan perkembangan ekonomi dan moneter nasional. Kebijakan kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, tarif tol dan suku bunga bank diyakini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak menentunya angka capaian nilai inflasi.

a.6 Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Purwakarta tahun 2003 sebesar 57,03 persen sedangkan tahun 2004

besaran ini turun sedikit menjadi 56,64 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan adanya pergeseran angkatan kerja wanita yang beralih menjadi ibu rumah tangga. Pada tahun 2005 TPAK Kabupaten Purwakarta tercatat 56,81 persen dan tahun 2006 TPAK Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar 57,64. Penyebab utama dari kenaikan ini adalah karena meningkatnya penduduk yang memasuki usia kerja, penduduk yang mencari kerja maupun penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi dengan niat untuk bekerja. Besarnya potensi pekerja ini jika dimanfaatkan maka akan membawa kemajuan yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Purwakarta, namun sebaliknya bila tidak dimanfaatkan maka akan timbul permasalahan yang cukup kompleks karena akan berpengaruh negatif terhadap seluruh sektor pembangunan.

Di kabupaten Purwakarta, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta, angka pencari kerja dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2001 pencari kerja berjumlah 21.910 orang, tahun 2002 meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 46.961 orang. Kemudian pada tahun 2005 terdapat penurunan menjadi 42.100 orang, tetapi tahun 2006 angka pencari kerja kembali meningkat menjadi sebesar 53.573 orang.

a.7 Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin antara tahun 2002 - 2004 mengalami kecenderungan untuk terus berkurang. Namun, dinamika eksternal yang mempengaruhi nilai inflasi tinggi dan aktivitas ekonomi membuat jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 meningkat dengan tajam, tetapi seiring dengan terjadinya perbaikan kondisi ekonomi nasional serta program BLT (Bantuan Langsung Tunai), pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 205.707 jiwa. Berikut perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta tahun 2002 s/d 2006 : tahun 2002 berjumlah 101.400 orang, tahun 2003 berjumlah 97.600 orang, tahun 2004 berjumlah 95.519 orang, tahun 2005 berjumlah 207.058 orang, dan tahun 2006 berjumlah 205.707 orang.

b. Kondisi Ekonomi Persektor Pembangunan

b.1 Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

b.1.1 Pertanian Tanaman Pangan

Perkembangan produksi padi di Kabupaten Purwakarta, baik untuk padi sawah maupun padi ladang secara umum pada tahun 2006 mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 2006 produksi padi sawah telah mencapai 188.415 ton, atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2005 yang hanya mencapai 176.634 ton. Sedangkan untuk produksi padi ladang, pada tahun 2006 juga menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan, yaitu dari sebesar 15.332 ton pada tahun 2005 menjadi 15.614 ton pada tahun 2006. Terdapatnya peningkatan produksi padi, baik padi sawah maupun padi ladang merupakan hasil dari upaya intensifikasi pertanian (melalui pemilihan bibit, pemupukan dan pengendalian hama yang tepat), serta terdapatnya curah hujan yang cukup, yang memungkinkan petani dapat panen lebih dari satu kali dalam setahun.

Pada sisi luasan lahan, perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta pada umumnya terbagi atas lahan sawah dan bukan lahan sawah, untuk lahan sawah terdapat beberapa jenis, yaitu irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa / non PU, tadah hujan, pasang surut, lebak serta polder dan lainnya. Dimana secara keseluruhan pada tahun 2005 luas penggunaan lahan sawah mencapai 15.564 Ha. Sementara pada tahun 2006 terdapat penurunan luas penggunaan lahan sawah menjadi 15.532 Ha atau terdapat penurunan sekitar 32 Ha.

Sementara untuk lahan bukan sawah terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu lahan kering dan lahan lainnya, dimana untuk lahan kering terbagi atas pekarangan, tegal / kebun, ladang / huma, pengembalaan / padang rumput; sementara tidak diusahakan, ditanami pohon / hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lain-lain. Untuk lahan lainnya terbagi atas rawa-rawa (yang tidak ditanami / waduk), tambak dan kolam / tebat / empang. Luas Penggunaan lahan bukan sawah secara keseluruhan pada tahun 2005 mencapai 81.608 ha, sementara pada tahun 2006 terdapat peningkatan sekitar 32 Ha atau mencapai 81.640 ha.

b.1.2 Palawija

Perkembangan produksi palawija di Kabupaten Purwakarta selama periode tahun 2005 - 2006, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2005 produksi palawija mencapai 126.949 ton, sedangkan pada tahun 2006 menunjukkan adanya peningkatan yaitu menjadi sebesar 158.425 ton.

Peningkatan tersebut diakibatkan oleh perubahan pengaturan pola dan tata tanam dari tanaman pangan ke tanaman hortikultura, penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura dan bertambahnya jumlah populasi tegakan tanaman yang menghasilkan.

b.1.3 Perkebunan

Perkembangan produksi hasil tanaman perkebunan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006 juga menunjukkan adanya peningkatan produksi. Pada tahun 2005 produksi hasil tanaman perkebunan mencapai 7.271,09 ton, sedangkan pada tahun 2006 telah meningkat menjadi sebesar 7.834,19 ton atau terdapat peningkatan sebesar 7,74 persen.

Peningkatan produksi perkebunan diantaranya sebagai dampak dilakukannya penerapan teknologi pemupukan pra panen dan pasca panen, penerapan prinsip-prinsip pengendalian organisme pengganggu tanaman, dilaksanakannya pemangkasan atau peremajaan terhadap tanaman yang telah tua atau tidak produktif dan bertambahnya jumlah tegakan tanaman yang menghasilkan.

b.1.4 Peternakan

Pembangunan Peternakan dan Perikanan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup dan kemandirian petani ternak dan ikan dalam rangka pencapaian kecukupan pangan dengan mengembangkan usaha yang berwawasan agribisnis. Misi penting dalam pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Purwakarta adalah mengoptimalkan seluruh sumberdaya peternakan dan perikanan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kecukupan pangan. Sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap produk daging, telur, susu dan ikan. Peningkatan permintaan terhadap produk peternakan dan perikanan tersebut harus diimbangi dengan pertumbuhan populasi dan produktivitas ternak dan ikan.

Produksi hasil peternakan meliputi : daging, telur dan susu, dimana perkembangan produksi hasil peternakan di Kabupaten

Purwakarta pada tahun 2006 secara umum menunjukkan adanya peningkatan, terutama untuk komoditi telur dan susu. Sedangkan untuk perkembangan populasi ternak di Kabupaten Purwakarta untuk sapi perah dan domba menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada tahun 2006 populasi sapi perah naik dari 19 menjadi 24 ekor dan populasi domba naik dari 282.435 ekor menjadi sebesar 352.345 ekor.

b.1.5 Perikanan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, perkembangan produksi hasil perikanan pada tahun 2006 mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama pada ikan mas dan ikan nila dibandingkan dengan capaian produksi pada tahun 2005. Pada tahun 2006 produksi ikan mas mencapai 30.833,2 ton atau meningkat sebesar 63,28 % dibandingkan tahun 2005, sedangkan untuk produksi ikan nila pada tahun 2006 telah mencapai produksi sebesar 18.250,6 ton atau meningkat sebesar 68,4 % dibandingkan tahun 2005.

b.2 Industri, perdagangan dan Penanaman Modal

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta, pada tahun 2006 jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten Purwakarta meningkat dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu dari semula 3.232 unit menjadi 3.294 unit. Sedangkan untuk industri besar pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu dari 90 unit pada tahun 2005 menjadi 87 unit.

Perkembangan nilai investasi swasta untuk jenis perusahaan dalam negeri (PMDN) di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006 jumlahnya tetap yaitu sebesar 23 unit, dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.167.404.375.260. Sedangkan untuk jenis perusahaan asing (PMA) jumlahnya pada tahun 2006 menurun dari 59 unit pada tahun 2005 menjadi 58, dengan nilai investasi sebesar US \$ 573.148.995,87.

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006 meningkat dari US \$ 188.971.946,18 pada tahun 2005 menjadi US \$ 189.126.310,13. Sedangkan perkembangan jumlah perusahaan eksportir pada tahun 2006 meningkat menjadi 26 unit dibandingkan dengan tahun 2005 yang baru mencapai 21 unit.

Secara umum, perkembangan jumlah pasar di Kabupaten Purwakarta, baik itu untuk pasar tradisional, pasar modern dan pasar desa selama tahun 2005 dan tahun 2006 jumlahnya tidak banyak

mengalami perubahan. Sedangkan untuk mini market jumlahnya mengalami peningkatan, yaitu dari 16 unit pada tahun 2005 menjadi 25 unit pada tahun 2006.

b.3 Koperasi dan UKM

Peran sektor industri kecil dan koperasi dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Purwakarta. Sektor lainnya yang ditempati industri besar/ sedang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendapatan regional bruto Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan koperasi dan UKM Kabupaten Purwakarta, perkembangan jumlah koperasi terutama untuk Koperasi Non KUD pada tahun 2006 jumlahnya mengalami peningkatan yaitu dari 430 unit pada tahun 2005 menjadi 636 unit pada tahun 2006. Sementara untuk Koperasi Unit Desa jumlahnya tetap, yaitu sebanyak 17 unit.

Peningkatan jumlah koperasi di tahun 2006 itu dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Daerah bahwa setiap desa harus memiliki koperasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan Usaha Ekonomi Mikro kepada aksesibilitas permodalan, dengan menjadi anggota disetiap Koperasi Desa yang berada di daerah masing-masing.

Sedangkan perkembangan jumlah UKM di Kabupaten Purwakarta berdasarkan sektor yang terbina mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2006 jumlahnya meningkat, yaitu dari 149 unit pada tahun 2005 menjadi 400 unit pada tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan oleh berkembangnya sektor-sektor ekonomi dipedesaan, masyarakat desa mulai mengembangkan potensi-potensi desa sehingga pergerakan ekonomi dan perputaran uang menjadi lebih baik.

Keterserapan tenaga kerja pada Sektor UKM di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006 menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 609 orang pada tahun 2005 menjadi 853 orang pada tahun 2006. UKM yang bergerak pada Sektor Industri pada tahun 2006 menyerap tenaga kerja yang terbesar yaitu sebanyak 517 orang. Peningkatan ini di disebabkan oleh meningkatnya investasi pada sektor industri kecil dan menengah.

b.4 Kepariwisataaan

Karakteristik fisik daerah yang mempesona dan lokasinya yang strategis berada pada jalur lintas Jakarta - Bandung, membuat sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan. Terdapat pula

berbagai potensi objek wisata alam, wisata budaya dan wisata ziarah. Selain itu Kabupaten Purwakarta kaya akan seni dan budaya pertunjukan, antara lain tari buncis, calung, pencak silat, wayang golek, kasidah, jaipong, degung dengan makanan tradisional seperti sate maranggi, kue jala beria, peuyeum, simping, gegetuk, keripik singkong, keripik pisang, manisan pala, gula cikeris, gula kawung (aren) dan lain-lain.

Secara umum perkembangan jumlah dan perincian objek wisata di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2006, tidak mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan kondisi capaian tahun 2005. Kabupaten Purwakarta memiliki 3 (tiga) Satuan Kawasan Wisata (SKW), yaitu Satuan Kawasan Wisata I Purwakarta, Satuan Kawasan Wisata II Plered dan Satuan Kawasan Wisata III Wanayasa.

Perkembangan jumlah kunjungan wisata ke objek wisata di Kabupaten Purwakarta antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, Menurut data yang diperoleh dari Badan Pariwisata Kabupaten Purwakarta, terdapat kenaikan yang lebih sedikit terhadap perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Purwakarta. Dimana pada tahun 2005 perkembangan jumlah kunjungan wisatawannya bisa mencapai 21,7 % dibandingkan pada tahun 2004, namun pada tahun 2006 terjadi penurunan kenaikan prosentase jumlah kunjungan wisatawan menjadi sebesar 0,21 %. Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh adanya Jalan Tol Cipularang yang berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan perkembangan jumlah Keterserapan tenaga kerja pada Sektor Pariwisata tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, berdasarkan data dari Badan Pariwisata didominasi oleh sektor usaha rumah makan. Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh usaha rumah makan yaitu berjumlah 631 orang. kemudian usaha perhotelan, terutama hotel berbintang dan hotel melati serta kompepar juga merupakan bidang usaha kepariwisataan yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Purwakarta.

- **Sumber Daya Alam**

- a. **Kehutanan**

Produksi kayu bulat merupakan produksi hasil hutan yang paling dominan, dimana produksi kayu bulat di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu dari 9.094.389 M³ pada tahun

2005 menjadi 7.167.561 M³. Hal ini disebabkan berkurangnya frekwensi penebangan sebagai dampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kelestarian lingkungan bagi kehidupan sehingga mereka dalam melakukan pengelolaan hutan rakyat lebih selektif dalam hal penebangan kayu, penebangan dilakukan secara tebang pilih dan cenderung mempertahankan vegetasi tetap dan tegakan tanaman tahunan khususnya di daerah-daerah lereng dan perbukitan dan lahan kritis lain.

b. Pertambangan dan Energi

b.1 Sumber Daya Air

Pada awal tahun 2003, kondisi sarana dan prasarana air bersih terus ditingkatkan baik di kawasan pedesaan maupun di perkotaan, melalui kegiatan penyediaan sarana Air Bersih (PSAB) yang ditangani oleh pemerintah, swadaya masyarakat dan Perusahaan Daerah Air Minum. Pelayanan PDAM Purwakarta masih belum memuaskan, sebab daerah layanannya baru mencapai 40% dari total jumlah penduduk perkotaan dengan standar pelayanan air bersih sebesar 130 liter per orang per hari. Sumber air baku PDAM Purwakarta berasal dari Desa Salem (Cigoong) Kecamatan Pondok Salam dan dari Waduk Jatiluhur (Desa Cibinong) dengan kapasitas sebesar 140 liter/detik.

Untuk keperluan pertanian, sumber air baku di Kabupaten Purwakarta cukup besar ditopang pemenuhannya oleh Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata dan beberapa sungai besar serta sumber air lainnya. Waduk Jatiluhur yang terletak pada ketinggian 111,6 m dari permukaan air laut, merupakan reservoir air terbesar di Jawa Barat dengan daya tampung sebesar 3.000.000.000 m³ (3 Milyard kubik) serta mengairi lahan sawah seluas 260.000 Ha. Daya tampung Waduk Cirata sebesar 2.000.000.000 m³ sebagai penyedia air baku dan irigasi dengan debit 14 m³/detik.

b.2 Pertambangan dan Penggalan

Kabupaten Purwakarta memiliki potensi yang cukup besar di Bidang Pertambangan khususnya pada Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sedangkan Bahan Galian Golongan A dan B belum dieksploitasi. Data perusahaan pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2005 terdapat sekitar 21 buah, dimana kondisi ini hampir sama dengan tahun 2004 yang sebagian besar berlokasi di Kecamatan Plered dan Sukatani.

2.1.4 Sosial Budaya Dan Politik

a. Kondisi Makro Sosial Budaya Daerah

Kondisi sosial makro daerah tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Indeks (HDI)*. Perlu diingat kembali bahwa IPM, yang dihitung berdasarkan dari rata-rata indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli, merupakan gambaran kualitas pembangunan manusia yang dapat diukur.

Kaitannya dengan *Indeks Pembangunan Manusia*, berdasarkan data BPS Kabupaten Purwakarta, IPM Purwakarta, pada tahun 2006 adalah sebesar 69,62 atau meningkat sebesar 0,10 point jika dibandingkan dengan capaian tahun 2005 yaitu sebesar 69,52. Memperhatikan perkembangan IPM Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2006, berdasarkan data sementara yang dikeluarkan BPS Kabupaten Purwakarta, menunjukkan kondisi peningkatan. Berdasarkan catatan kami, pada periode Tahun 2003-2004 terjadi peningkatan IPM sebesar 0,67 poin, periode Tahun 2004-2005 meningkat sebesar 0,66 poin dan pada periode Tahun 2005-2006 kenaikannya sebesar 0,10 poin.

Walaupun dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan capaian IPM, capaian pada tahun 2006 sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan angka IPM Propinsi Jawa Barat pada tahun 2006 yaitu sebesar 70,05 atau terdapat gap selisih 0,13 poin.

b. Kondisi Sosial Budaya Daerah

b.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan pendidikan meliputi pembangunan pendidikan formal maupun non formal. Peran pendidikan formal dan non formal sebagai suatu lembaga harus mampu mengembangkan keahlian dan pengetahuan sebagai kekuatan yang dapat meningkatkan perekonomian dan strata sosial masyarakat. Disamping itu pendidikan formal dan non formal juga bermanfaat dalam menanamkan tata nilai, cita-cita, tingkah laku dan aspirasi yang mungkin berkaitan dengan pembangunan bangsa khususnya pembangunan manusia Purwakarta seutuhnya.

Untuk melihat sejauh mana potensi pembangunan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, maka akan disajikan

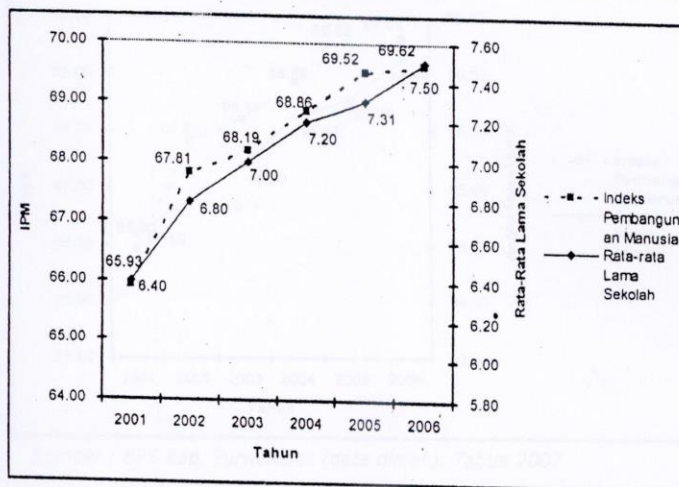
gambaran pendidikan di Kabupaten Purwakarta melalui indikator makro bidang kependidikan, yaitu meliputi :

✓ **Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Kinerja bidang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006 ditandai dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Purwakarta yang merupakan gambaran lamanya penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersekolah. Sampai dengan tahun 2005, RLS Purwakarta masih sebesar 7,31 tahun atau rata-rata tingkat pendidikan penduduk Purwakarta adalah tidak tamat SLTP atau baru mencapai kelas 2 SLTP. Pada tahun 2006, RLS penduduk Purwakarta mencapai 7,50 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,19 poin dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi capaian RLS Kabupaten Purwakarta dari kurun waktu tahun 2001-2006, seperti dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.1
Perkembangan Angka Capaian RLS
dan IPM Kabupaten Purwakarta
Tahun 2001-2006



Sumber : BPS Kab. Purwakarta (Data Diolah), Tahun 2007

Berdasarkan Grafik di atas terlihat pertumbuhan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sejalan dengan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian menunjukkan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) cukup berkontribusi positif terhadap peningkatan capaian Angka Indeks Pembangunan Manusia.

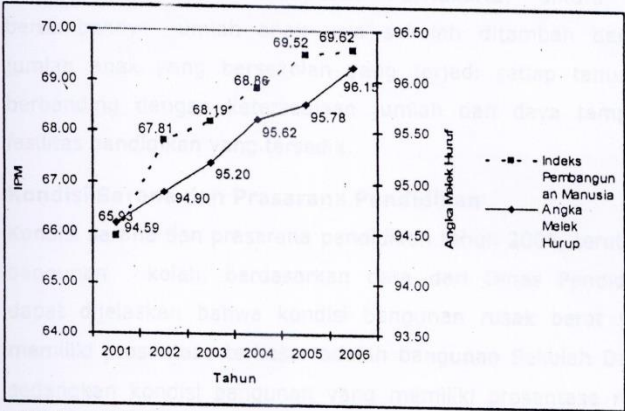
✓ **Angka Melek Huruf (AMH)**

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan tingkat kemampuan baca/tulis penduduk secara rata-rata serta tingkat mutu pendidikan masyarakat suatu wilayah.

Kemampuan baca/tulis dapat diukur dengan tingkat buta huruf. Hubungan tingkat buta huruf ini sangat erat terhadap tingkat kecerdasan, penyerapan pengetahuan, teknologi, komunikasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk maju. Pengalaman menunjukkan bahwa kecenderungan timbulnya keterbelakangan dan kemiskinan penduduk berawal dari penduduk yang buta huruf.

Di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006, Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 96,15 atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2005 yaitu sebesar 95,78. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Purwakarta untuk kurun waktu tahun 2001-2006 sebagaimana terlihat pada Grafik sebagai berikut :

Grafik 2.2
Perkembangan AMH dan IPM
Kabupaten Purwakarta Tahun 2001-2006



Sumber : BPS Kab. Purwakarta (data diolah), Tahun 2007

Angka Melek Huruf masyarakat Purwakarta bila dilihat dari kemampuan membaca dan menulis, baik membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya sudah sangat baik. Keadaan ini tercermin dari tingginya angka melek huruf masyarakat yang sudah menunjukkan angka 94,59 persen di tahun 2001, dan angka tersebut meningkat untuk lima tahun selanjutnya dengan besaran 96,15 persen di tahun 2006. Hal ini berarti bahwa selama selang periode lima tahun kebelakang tingkat buta huruf masyarakat Purwakarta mengalami penurunan yang cukup baik.

✓ **Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)**

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI, SMP/ MTs dan SMA/MA di Kabupaten Purwakarta dari kurun waktu tahun 2004-2006, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Prosentase APK Dan APM
Kabupaten Purwakarta Tahun 2004-2006

No.	Sekolah	APK (%) Tahun			APM (%) Tahun		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006
1.	SD/ MI	102,59	106,49	105,62	90,32	93,97	91,53
2.	SMP/ MTs	40,26	68,94	88,51	44,99	53,56	73,63
3.	SMA/MA	25,25	33,36	52,21	17,79	26,12	37,92

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2006

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten

Purwakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Banyak faktor yang turut menyebabkan naik dan turunnya persentase APK dan APM di Kabupaten Purwakarta, antara lain bertambahnya jumlah anak usia sekolah ditambah dengan jumlah anak yang bersekolah yang terjadi setiap tahunnya berbanding dengan ketersediaan jumlah dan daya tampung fasilitas pendidikan yang tersedia.

✓ **Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan tahun 2006, terutama bangunan sekolah, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dapat dijelaskan bahwa kondisi bangunan rusak berat yang memiliki prosentase terbesar adalah bangunan Sekolah Dasar, sedangkan kondisi bangunan yang memiliki prosentase rusak berat terkecil adalah jenis sekolah Madrasah Aliyah/MA (tidak terdapat bangunan berkondisi rusak berat).

Tabel 2.2
Kondisi Bangunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2006

No.	Jenis Sekolah	Kondisi Bangunan		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	SD	68,14	12,59	19,27
2.	MI	70,08	24,41	5,51
3.	SLTP	76,41	14,61	8,98
4.	MTs	77,10	10,69	12,21
5.	SMA	90,18	4,91	4,91
6.	MA	90,00	10,00	00,00
7.	SMK	90,95	8,04	1,01

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2006

✓ **Jumlah Lulusan, Mengulang dan Putus Sekolah**

Pada Tahun 2006, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, jumlah lulusan dan jumlah mengulang terbesar berdasarkan jenjang sekolah adalah lulusan SD yaitu sebanyak 14.211 siswa. Sedangkan untuk prosentase jumlah lulusan terbesar justru jenjang sekolah tingkat Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki prosentase jumlah lulusan yang terbesar yaitu 100% (lulus semua). Sedangkan untuk prosentase jumlah mengulang dan putus sekolah terendah juga masih diduki oleh jenjang sekolah tingkat Madrasah Aliyah (MA) yaitu 0%.

Tabel 2.3
Jumlah Lulusan, Mengulang Dan Putus Sekolah
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2006

No	Jenjang Sekolah	Lulusan	Mengulang	Putus Sekolah
1.	SD	14.211	2.006	237
2.	MI	993	24	17
3.	SLTP	7.456	63	244
4.	MTs	1.391	2	33
5.	SMA	2.195	14	65
6.	MA	363	0	0
7.	SMK	3.841	34	105

Sumber : LAKIP Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta, 2007

Secara umum, pembangunan di bidang pendidikan masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya kompetensi SDM pendidik secara optimal terutama dalam mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
2. Di Kabupaten Purwakarta daya tampung untuk semua jenjang pendidikan secara normatif sudah terpenuhi. Namun kecukupan daya tampung ini belum ditunjang oleh kualitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sebagian sekolah belum dapat dioptimalkan.
3. Biaya penyelenggaraan pendidikan yang relatif tinggi menjadi beban bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat miskin (maskin).
4. Lemahnya sistem dan mekanisme pendidikan non formal yang mampu menjamin pemberian akses yang cukup bagi segenap masyarakat Purwakarta, sehingga menyebabkan masih dijumpainya angka buta huruf dan putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar.
5. Masih adanya pola pikir yang berdampak pada bias gender dalam partisipasi, akses, pemerataan dan manajemen pendidikan.

b.2 Kesehatan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan tercapai bila derajat kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini dapat terjadi apabila mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata

dapat ditingkatkan serta kesadaran dan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat pun dikembangkan.

Indikator kesehatan yang cukup menarik untuk diamati adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). Angka ini merupakan indikator agregasi dari indikator-indikator kesehatan lainnya, yaitu seperti : angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, pemenuhan gizi, derajat kesehatan lingkungan masyarakat, cakupan imunisasi, dan banyak indikator kesehatan lainnya.

✓ **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka Harapan Hidup (AHH) yang dipakai pada penghitungan IPM ini adalah angka harapan hidup 0 tahun (e_0), yang menggambarkan rata-rata lamanya hidup yang mungkin dicapai oleh penduduk sejak usia 0 tahun. Angka ini secara teoritis mempunyai hubungan terbalik dengan korelasi yang tinggi dengan angka kematian bayi, artinya apabila terjadi penurunan angka kematian bayi maka terjadi peningkatan terhadap angka harapan hidup. Namun tinggi rendahnya angka harapan hidup tidak berarti hanya dipengaruhi angka kematian bayi, karena angka ini secara umum menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, sistem pelayanan kesehatan, maupun kesadaran masyarakat dalam hal perilaku hidup sehat.

Dalam mencapai tingkat harapan hidup yang ideal memang bukan persoalan yang mudah, karena menyangkut banyak aspek dan variabel yang mempengaruhinya. Namun yang paling utama harus diperhatikan adalah bagaimana menekan Angka Kematian Bayi (IMR) dan angka kematian ibu melahirkan (MMR). Persoalan ini tidak sebatas bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana kesehatan tetapi jauh melampaui batas-batas dimaksud. Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah persoalan sosial ekonomi masyarakat dan kultur atau tata nilai pada masyarakat (terutama yang berdampak pada kesehatan anak) itu sendiri.

Derajat kesehatan masyarakat Purwakarta yang dijelaskan oleh besaran Angka Harapan Hidup (AHH) selama periode 2001 - 2006 menunjukkan angka yang terus meningkat. Pada tahun 2001 tercatat besaran 64,00 dan lima tahun kemudian yaitu tahun 2006 menjadi 65,90 atau dalam kurun waktu lima tahun tersebut terjadi peningkatan sebesar 1,90 tahun. Capaian angka peningkatan AHH tersebut

menunjukkan telah terjadi peningkatan tingkat kesehatan masyarakat.

✓ **Tenaga Kesehatan**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penjabaran dari pembangunan nasional, oleh karena itu tujuan pembangunan kesehatan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung terhadap tercapainya tujuan tersebut diatas

Jumlah tenaga kesehatan yang berada pada instansi pemerintah (data tenaga kesehatan swasta tidak ada) di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2006 sebanyak 921 orang dengan penyebaran sebagai berikut :

1. 562 (49.428%) orang bekerja di 19 Puskesmas
2. 484 (42.57%) orang bekerja di RSUD Bayu Asih Purwakarta
3. 86 (8.00%) orang bekerja di Dinas Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan per kategori tenaga per 100.000 penduduk di Kabupaten Purwakarta tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2006

No.	Jenis Tenaga	Jumlah	Ratio per 100.000 Penduduk
1.	Tenaga Medis	119	15.21
2.	Tenaga Keperawatan	528	67.49
3.	Tenaga Kefarmasian	23	2.93
4.	Tenaga Kesmas	18	2.30
5.	Tenaga Gizi	15	1.91
6.	Sanitarian	31	3.96
7.	Keteknisan Medis	14	1.79
Jumlah		748	95.61

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2007.

✓ **Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Sarana pelayanan kesehatan di Purwakarta Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- Rumah Sakit : 1 buah
- Puskesmas : 19 buah
- Puskesmas Pembantu : 41 buah
- Puskesmas Keliling : 14 buah
- Polindes : 9 buah
- Balai Pengobatan : 65 buah

- Rumah Bersalin : 12 buah
- Apotik : 32 buah
- Laboratorium Kesehatan : 5 buah
- Optik : 32 buah
- Pengobatan Tradisional : 389 orang
- Dokter Umum : 110 orang
- Dokter Gigi : 31 orang
- Bidan : 35 orang
- Posyandu : 876 buah

Dari 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Purwakarta, pada tahun 2006 terdapat 4 puskesmas yang telah menjadi Puskesmas PONED, walaupun 2 puskesmas PONED baru, baru selesai dibangun dan berada dalam masa perintisan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat.

✓ **Keluarga Berencana (KB)**

Perkembangan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006, menghasilkan capaian makro sebagai berikut :

1. Jumlah Akseptor Aktif

↓ Tahun 2005: 109.496 Orang

↓ Tahun 2006: 113.416 Orang

2. Jumlah Akseptor Bukan Peserta KB (Pasif)

Tahun 2005

- PUS bukan peserta KB : 34.648 orang
- Ingin Anak segera : 10.193
- Ingin Anak Ditunda : 1.814
- Tidak ingin anak lagi : 10.606
- Tidak Hamil : 28.613
- Hamil : 6.035

Tahun 2006

- PUS bukan peserta KB : 32.989 orang
- Ingin Anak segera : 9.889
- Ingin Anak Ditunda : 7.762
- Tidak ingin anak lagi : 9.052
- Tidak Hamil : 26.703
- Hamil : 6.286

Pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Purwakarta, secara umum masih dihadapkan pada beberapa kendala dan permasalahan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih khususnya pada masyarakat pedesaan. Dengan melihat data tahun 2005 khususnya data pola penyakit rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit pada semua golongan umur sebagian besar disebabkan oleh infeksi mikroorganisme yang berhubungan dengan kondisi lingkungan, perilaku hidup sehat dan kerentanan tubuh. Hal ini ditandai dari tingginya angka penderita Diare dan Gastroenteritis pada tahun 2005 yaitu sebesar 1.075 kasus, demam yang tidak diketahui penyebabnya sebanyak 682 kasus, TBC Paru sebanyak 574 kasus, Demam Berdarah Dengue (DBD) sebanyak 350 kasus, cidera YDT lainnya YTT dan daerah badan *multiple* sebanyak 314 kasus, Dispepsia sebanyak 249 kasus, demam tifoid dan paratifoid sebanyak 181 kasus, dan penyakit virus lainnya sebanyak 163 kasus.
2. Angka kematian ibu melahirkan (**MMR**) masih cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2004 kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran hidup tercatat sebanyak 27 jiwa, mengalami penurunan menjadi 16 jiwa pada tahun 2005, dan meningkat lagi sebanyak 22 jiwa pada tahun 2006 walaupun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan data laporan program KIA, jumlah kematian ibu maternal pada tahun 2000 sebanyak 35 orang.
3. Pada tahun 1995 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Purwakarta sebanyak 74,33 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian turun menjadi 64,00 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi pada tahun 2005 sebanyak 99 kasus, dan pada tahun 2006 terjadi penurunan sebanyak 92 kasus. Dibandingkan dengan angka kematian bayi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya relatif menurun.
4. Walaupun ada kemungkinan kecenderungan AKB relatif akan naik lagi pada tahun-tahun mendatang disebabkan beberapa asumsi negatif diantaranya belum stabilnya kondisi perekonomian (daya beli) di Kabupaten Purwakarta dan ketidakjelasan berakhirnya krisis multi dimensi Nasional yang berkepanjangan.
5. Menurunnya jumlah balita yang diimunisasi dari tahun ke tahun perlu mendapat perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2003 tercatat jumlah balita yang diimunisasi sebanyak 17.152 balita, pada tahun 2004 menjadi 17.238 balita dan menurun tajam pada tahun 2005 menjadi 15.687 balita.

6. Belum optimalnya antisipasi masyarakat dan pemerintah daerah pra dan pasca musim penghujan dan saat musim kemarau. Hal ini dapat diindikasikan dari banyaknya pasien yang datang untuk berobat setiap bulannya. Jumlah dan prosentase jenis keluhan sakit yang diderita pasien pada musim-musim tertentu berhubungan dengan "udara kotor", dapat dijabarkan sebagai berikut: penyakit utama adalah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sebanyak 567 penderita (49,65%), Nasofaringitis Akuta (*Common Cold*) 186 penderita (16,29%), Sinusitis Akuta sebanyak 33 penderita (2,89 %) selebihnya penyakit yang dapat dikatakan tidak terlalu berhubungan dengan udara.
7. Secara umum status gizi masyarakat di Kabupaten Purwakarta sudah mengalami peningkatan dengan indikator keberhasilan program upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK) melalui pelayanan gizi di posyandu. Akan tetapi akibat dampak krisis moneter yang berkepanjangan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat sehingga derajat kesehatan dan status gizi masyarakat belum dapat dikatakan membaik ditahun-tahun mendatang. Masalah utama gizi di kabupaten Purwakarta meliputi masalah Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kekurangan Vitamin A (KVA).
8. Perkembangan cakupan hunian sehat dari tahun 1999 s/d 2005 terus mengalami peningkatan walaupun dalam kenaikan yang relatif kecil. Cakupan kepemilikan rumah sehat sampai tahun 2005 hanya mencapai 60%. Berdasarkan data Suseda 2005, persentase rumah tangga berdasarkan luas lantai di Kabupaten Purwakarta sebagian besar rumah (50,93%) dengan luas lantai 50-99 m² dan 38,82% dengan luas lantai 20-49 m². Untuk persentase jenis lantai terluas sebagian besar 96,05% bukan tanah dan 3,95% jenis lantai dengan tanah. Untuk jenis dinding rumah terluas disebutkan sebagian besar rumah terdiri dari tembok (70,20%), bambu (25,36%) dan jenis dinding yang terbuat dari kayu (4,44%).

b.3 Budaya

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan

dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya daerah. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai dan tatanan budaya lola akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif.

Krisis multi dimensi yang terjadi pada saat ini telah menyebabkan permasalahan krisis moral dan tata nilai Masyarakat. Norma-norma agama dan budaya sebagai warisan leluhur nenek moyang sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat sedang dihadapkan pada perubahan prinsip hidup dan tata nilai negatif yang berasal dari luar. Prinsip *hedonistik* dan *western oriented* nampaknya sudah menjadi pola yang mewarnai kehidupan masyarakat. Berdasarkan kondisi demikian, pengembangan dan reaktualisasi terhadap budaya luhur daerah mutlak harus dilakukan. Proses pembangunan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang berkarakter harus diorientasikan pada tatanan dan nilai *kesundaan (pilemburan)* dan religi, mengingat nilai *kesundaan (pilemburan)* dan religi Agama Islam merupakan basis budaya masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Pada aspek budaya, seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Purwakarta dihadapkan pada permasalahan dan kendala sebagai berikut :

1. Terjadinya proses degradasi nilai-nilai moral, sosial dan budaya terus terjadi di masyarakat. Semakin mudarnya kultur budaya masyarakat muda Sunda (akar kata dari *sun ing dada* yang berarti orang yang memiliki akhlak/ pribadi yang luhur, jauh dari kemunafikan, ikhlas dalam berbuat dan tanpa pamrih).
2. Infiltrasi budaya asing/luar yang bersifat negatif dan merusak bahkan membinasakan nilai-nilai luhur yang telah hidup dan terpatrit pada masyarakat Sunda pada khususnya dan nilai-nilai keagamaan pada umumnya. Maraknya acara televisi yang bergaya hedonis, mistik, gap antar suku, klas, golongan dan kelompok dari waktu ke waktu dirasakan telah merasuki jiwa remaja/ kaum muda Purwakarta. Ekses yang ditimbulkan dari infiltrasi budaya asing yang bersifat destruktif dan negatif pada akhirnya akan mengguncang tidak hanya nilai moral dan budaya masyarakat saja, tetapi akan terus melindas nilai-nilai akhlak dan agama masyarakat Kabupaten Purwakarta.
3. Reaksi yang dapat ditimbulkan dari permasalahan degradasi budaya adalah makin meningkatnya angka penyakit masyarakat (*pekat*) dan semakin tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2005 tercatat terjadi 377 kasus dengan

perincian: 47 kasus pencurian, 43 kasus perjudian, 38 kasus penipuan, 27 kasus narkoba, 22 kasus perampokan/ curas, 19 kasus penggelapan^o, 14 kasus kesusilaan, 13 kasus penganiyaan, 2 kasus memeras/ mengancam, 2 kasus merusak barang, 1 kasus pemalsuan materai, 1 kasus penadahan, 1 kasus dalam jabatan dan 157 kasus lain-lain. Sedangkan pada tahun 2004 terjadi 335 dan pada tahun 2003 terjadi 346 kasus.

4. Rendahnya penghargaan serta apresiasi dari masyarakat khususnya kaum muda yang cenderung berorientasi/ berkiblat pada budaya dan gaya hidup yang cenderung meniru muatan-muatan budaya luar, dibandingkan budaya dan produk budaya nasional/tradisional/ lokal tertentu. Ekses yang akan ditimbulkan dari sikap tersebut adalah semakin mudarnya (bahkan hilang) muatan nilai-nilai budaya nasional dan lokal.
5. Semakin merosotnya ikatan sosial dan keagamaan (*ukhuwah islamiyyah*) yang telah tumbuh pada jiwa masyarakat Purwakarta. Ikatan sosial dan sosial keagamaan ini (*ukhuwah islamiyyah*) tidak memandang suku, etnis, klas yang ada di dalam masyarakat Purwakarta. Konsep ikatan sosial adalah norma dan etika yang mengikat penduduk kabupaten Purwakarta untuk tetap saling harga menghargai dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat.
6. Pembangunan kehidupan beragama masih dirasakan belum optimal. Hal ini dapat terlihat baik dalam hal pengamalan/ pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan rumah, keluarga dan masyarakat begitupun di lingkungan kerja. Hal ini sangat "berat" dengan julukan yang diemban oleh Kabupaten Purwakarta sebagai "**Kota Santri**".
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat pedesaan akan hukum dan mengedepankan koridor hukum serta budaya tertib hukum pada segenap aspek kehidupan. Walaupun angka kriminalitas di Kabupaten Purwakarta masih relatif rendah namun di beberapa tahun-tahun mendatang terdapat gejala menunjukkan kenaikan yang relatif tajam, baik pada aspek kuantitas maupun kualitasnya.
8. Budaya paternalistik di Kabupaten Purwakarta masih relatif kental, sehingga masih terjadi bias gender terkait dengan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol di berbagai bidang kehidupan.

c. Kondisi Politik Daerah

Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi warga yang meliputi kebebasan politik dan stabilitas politik. Partisipasi warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif dan otonom dari seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat diketahui secara pasti. Di sisi lain dengan partisipasi masyarakat kadar legitimasi pemerintah yang berkuasa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena partisipasi sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Tolok ukur partisipasi adalah ketersediaan lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan seperti jumlah partai politik dan ormas; ketersediaan institusi mediasi yang merupakan cerminan *civil society* seperti jumlah organisasi non pemerintah dan pers; proporsi keterwakilan partai politik di lembaga legislatif; proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; tingkat partisipasi pemberian suara; jumlah unjuk rasa dan pemogokan kerja; serta keikutsertaan warga dalam berbagai kegiatan politik.

Sampai dengan tahun 1998 pembangunan politik diselenggarakan dalam kerangka demokrasi Pancasila, sebagai perkembangan lanjut dari demokrasi terpimpin di masa sebelumnya. Arah pembangunan politik ditujukan kepada terciptanya kondisi stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka itu, pemberlakuan asas tunggal Pancasila berlaku bagi seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Ruang demokratisasi terbuka ketika krisis ekonomi 1997, mendorong perubahan kepemimpinan nasional dan reformasi dalam segala bidang termasuk sistem politik. Perubahan politik secara besar-besaran terjadi dan tercermin pula dalam kehidupan politik di Kabupaten Purwakarta. Untuk dan atas nama demokratisasi, proses perubahan politik berlangsung sedemikian cepat ke arah kebebasan. Perubahan tersebut membawa dampak positif yang mendorong paradigma penyelenggaraan pembangunan partisipatoris, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Kendati demikian, proses perubahan politik yang berorientasi kepada penataan ulang sistem penyelenggaraan negara tersebut telah berkembang nyaris tanpa kendali, karena diterjemahkan sebagai proses pembebasan. Kondisi yang mewujud kemudian adalah berkembangnya euforia yang mencerminkan kegamangan menghadapi perubahan. Euforia yang tanpa kendali menjadikan pembangunan

politik masih mencari bentuk yang tepat. Sejalan dengan semangat reformasi, peraturan perundang-undangan di bidang politik dan otonomi daerah yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah masih mencari keseimbangan, antara lain hubungan eksekutif dengan legislatif dan desentralisasi dengan sentralisasi.

Dalam masa pencarian bentuk dan keseimbangan yang baru, Pemerintah dan masyarakat Purwakarta telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif, yang dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999, pemilu 2004 baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota DPR dan DPD, serta DPRD Propinsi dan Kabupaten.

Sampai dengan tahun 2006, di Kabupaten Purwakarta Jumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebanyak 15 lembaga atau terjadi penambahan 9 lembaga dibandingkan tahun 2005. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berjumlah 160 organisasi atau mengalami penambahan 125 organisasi dibandingkan dengan kondisi tahun 2005. Dan Partai Politik (Parpol) berjumlah 24 Partai Politik, atau tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2005. Terjadinya peningkatan jumlah LSM, Ormas dan Partai Politik dari tahun ke tahun menunjukkan semakin membaiknya kesadaran politik masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2.1.5 Prasarana Dan Sarana Wilayah

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah adalah bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan. Sarana dan prasarana wilayah merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan pada jangka panjang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Purwakarta secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis yaitu terletak diantara perlintasan pergerakan transportasi, perekonomian, perdagangan dan jasa yang menghubungkan Jakarta-Bandung, Jakarta-Cirebon, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan karakteristik wilayah terdiri dari dataran dengan kemiringan 0-15%, perbukitan 15-40% dan pegunungan diatas 40%. Hal tersebut menyebabkan kondisi dan karakteristik dari tiap-tiap wilayah kecamatan berbeda sehingga dari

penyebaran dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah tiap kecamatanpun akan berbeda pula.

Kondisi infrastruktur wilayah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2004-2006 sebagai berikut :

✓ **Air Bersih**

Laju pertumbuhan jumlah pelanggan PDAM sebesar 1,79 % per tahun (yaitu dari 16.919 unit pada tahun 2004 menjadi 17.228 unit pada tahun 2005). Demikian pula, jumlah air bersih yang disalurkan mengalami kenaikan sebesar 11,25 % (dari 6.741.000 M³ pada tahun 2004 menjadi 7.595.700 M³ pada tahun 2005) dan nilai produksi PDAM mengalami peningkatan sebesar 20,02 % (dari Rp. 9.509.000.000,- pada tahun 2004 menjadi Rp.11.918.675.000,- pada tahun 2005). Sumber air baku PDAM Purwakarta berasal dari Desa Salem (Cigoong) Kecamatan Pondok Salam dan dari Waduk Jatiluhur (Desa Cibinong) dengan kapasitas sebesar 140 liter/detik.

✓ **Pengairan dan Irigasi**

Sumber air baku di Kabupaten Purwakarta cukup besar yang berasal dari Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata dan beberapa sungai besar serta sumber air lainnya. Waduk Jatiluhur yang terletak pada ketinggian 111,6 m dari permukaan air laut, merupakan reservoir air terbesar di Jawa Barat dengan daya tampung sebesar 3.000.000.000 m³ (3 Milyard kubik) serta mengairi lahan sawah seluas 260.000 Ha. Daya tampung Waduk Cirata sebesar 2.000.000.000 m³ sebagai penyedia air baku dan irigasi dengan debit 14 m³/detik.

✓ **Telekomunikasi**

Pembangunan fasilitas telekomunikasi dan jaringan transmisi telah dapat melayani sampai ke pedesaan, walaupun tidak semua rumah tangga menggunakan fasilitas tersebut, tetapi telah tersedia warung telekomunikasi (wartel) yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Pada tahun 2004 di Kabupaten Purwakarta, terdapat 27.000 satuan sambungan telepon, terdiri dari 25.581 pelanggan dan 1.419 sambungan telepon untuk umum. Sedangkan pada tahun 2005 di Kabupaten Purwakarta, terdapat 26.608 satuan sambungan telepon, terdiri dari 25.416 pelanggan dan 1.192 sambungan telepon untuk umum, hal ini mengalami penurunan 1,45%.

✓ **Prasana Jalan**

Dukungan sarana dan prasarana jalan yang cukup memadai sangat diperlukan untuk mempermudah distribusi barang, orang dan jasa dari satu daerah ke daerah lainnya dan mempermudah mobilitas penduduk, karena prasarana jalan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah dan perekonomian masyarakat secara tidak langsung di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.5
Inventarisasi Jalan Kabupaten
Tahun 2005-2006

No	Tipe Permukaan	Tahun (Dalam Km)	
		2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Tanah	24.703	17.988
2	Jalan Kerikil / Batu	116.49	141.671
3	Jalan Aspal (Lapen)	471.985	441.803
4	Jalan Aspal (Hotmix)	87.583	108.883
JUMLAH		700.761	710.345

Sumber : Dinas Binamarga Kabupaten Purwakarta, Tahun 2007

Tabel 2.6
Kondisi Jalan Kabupaten Beraspal
Tahun 2005-2006

No	Tipe Permukaan	Tahun (Dalam Km)	
		2005	2006
1	2	3	4
1	Baik	271.593	186.982
2	Sedang	153.525	252.454
3	Rusak	101.98	111.250
JUMLAH		527.098	550.686

Sumber : Dinas Binamarga Kabupaten Purwakarta, Tahun 2007

✓ Sarana Perhubungan

Jumlah angkutan umum baik perkotaan maupun perdesaan, selama periode 2005-2006 relatif tetap. Pada tahun 2005 jumlah angkutan perkotaan adalah 730 unit, sedangkan pada tahun 2006 berjumlah 734 unit. Sedangkan jumlah angkutan perdesaan selama periode yang sama bertambah dari 522 pada tahun 2005 menjadi 528 unit pada tahun 2006. Kepada para penyelenggara jasa angkutan umum, pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2006 melaksanakan pembinaan laik jalan kendaraan bermotor. Peningkatan kesadaran akan pengoperasian kendaraan dalam kondisi laik jalan diharapkan akan dapat meningkatkan jaminan keselamatan para pengguna angkutan umum dan pengguna jalan lainnya.

Tabel 2.7
Banyaknya Armada Angkutan Umum
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2006

Jenis Pelayanan	Tahun 2005	Tahun 2006	Perkembangan
1. Angkutan Kota	730	734	0,55 %
2. Angkutan Pedesaan	522	528	1,15 %
JUMLAH	1.252	1.262	0,80 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2007

Pada sisi infrastruktur perhubungan, di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2006 terdapat 4 buah terminal tipe C. Terminal tersebut yaitu Terminal Ciganea, Gembong, Plered, dan Wanayasa. Melalui kegiatan rehabilitasi terminal angkutan umum, pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2006 telah melakukan emplasemen untuk sirkulasi kendaraan, sehingga tingkat layanan terminal dapat tetap dipertahankan optimal.

Aktivitas perhubungan di Kabupaten Purwakarta senantiasa meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa permasalahan dan hambatan yang menjadi tantangan pembangunan bidang perhubungan sampai saat ini diantaranya yaitu:

- 1) Purwakarta berada diantara Pusat Kegiatan Regional sehingga *through traffic* yang melewati Wilayah Kabupaten Purwakarta cukup tinggi;
- 2) Ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan bermotor dan panjang jaringan serta struktur Wilayah Kabupaten Purwakarta yang masih bersifat konsentrik menyebabkan beberapa lokasi rawan terhadap kemacetan;
- 3) Rambu lalu-lintas yang masih kurang memadai, perilaku pengguna kendaraan bermotor yang kurang mengindahkan kaidah tertib berlalu-lintas, dan penggunaan kendaraan tidak laik jalan tidak jarang menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu-lintas;
- 4) Tingkat layanan angkutan umum dan terminal yang melayani transportasi massal darat dan danau masih kurang memadai.

✓ Sarana Perumahan

Kondisi perumahan yang ada di Kabupaten Purwakarta saat ini sebagian besar merupakan perumahan permanen, yang lainnya merupakan perumahan semi permanen dan sederhana. Penentuan kebutuhan rumah di Kabupaten Purwakarta pada masa yang akan datang, mengambil asumsi bahwa setiap keluarga membutuhkan rumah sendiri untuk dapat hidup layak dan sejahtera. Luas setiap kapling dan bangunan ditentukan oleh tingkat penghasilan penduduk. Semakin besar penghasilan yang didapat, maka semakin baik pula kualitas yang lebih baik dengan kapling yang lebih besar, begitu pula sebaliknya.

Secara keseluruhan kondisi permukiman/perumahan di Kabupaten Purwakarta masih relatif baik dibandingkan Kabupaten / kota lain yang

memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi. Permasalahan umum yang dihadapi dalam hal ini umumnya adalah berhubungan dengan kualitas jalan lingkungan, jaringan irigasi dan belum luasnya jaringan perpipaan penyaluran air bersih ke penduduk.

✓ Persampahan

Perkembangan permukiman dan perekonomian berdampak terhadap produksi sampah di Kabupaten Purwakarta. Jumlah rata-rata produksi sampah per hari pada tahun 2006 tidak kurang dari $\pm 210 \text{ M}^3$. Sebagian sampah tersebut dikumpulkan pada TPS/TPSS sebelum diangkut menuju TPA.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan, pemerintah daerah mempunyai tenaga kebersihan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang, terdiri dari 58 (lima puluh delapan) orang petugas penyapuan, 3 orang petugas Gedung PKK, 3 orang petugas TPA, dan 25 orang petugas pertamanan.

Sejak tahun 2006 pembuangan akhir sampah di Kabupaten Purwakarta dialihkan dari TPA Ciwareng ke TPA Cikolotok. TPA Cikolotok yang terletak di Desa Margasari Kecamatan Pasawahan berada diatas lahan seluas 5,6 Ha. Metoda pengolahan sampah yang digunakan pada TPA ini adalah Sistem Land Fill. Dengan luasan dan sistem pengolahan tersebut, TPA Cikolotok diharapkan dapat menampung sampah lebih dari 10 (sepuluh) tahun ke depan.

2.1.6 Pemerintahan

Pemerintah Daerah di masa yang akan datang, dihadapkan pada permasalahan internal dan eksternal. Dari sisi eksternal, pemerintah daerah akan dihadapkan pada dampak globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah daerah akan menghadapi kondisi masyarakat yang semakin cerdas (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan (*demanding community*).

Upaya untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain dapat tercermin dari indikator : keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis *good governance* mensyaratkan ada jejaring kerja dan kemitraan di antara seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha maupun

masyarakat (*civil society*). Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan tidak hanya bertumpu pada kapasitas pemerintah sebagai actor tunggal dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Namun perlu sinergitas di antara seluruh aktor terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Karena itu keberhasilan penerapan governance tidak hanya ditentukan dari seberapa besar kapasitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, tetapi juga dari kapasitas pemerintah dalam mewujudkan sinergitas stakeholders lainnya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan mediator dalam tata kelola pemerintahan.

Sampai dengan tahun 2006, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, dengan jumlah Dusun sebanyak 490, Rukun Warga (RW) sebanyak 1.056, dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 3.071.

Berdasarkan PP NO 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah NO 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta, terdapat 14 Dinas, 7 Badan, 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 4 Kantor, 1 Sekretariat KPUD 17 Kecamatan dan 9 Kelurahan. Dengan jumlah eselon masing-masing: Eselon II sebanyak 26 orang, Eselon III sebanyak 137 orang, dan Eselon IV sebanyak 489 orang.

2.2. Prediksi Kondisi Umum Kabupaten Purwakarta

2.2.1 Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Purwakarta yang memiliki struktur wilayah yang menarik, wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan disebelah selatan, tenggara dan barat, mendatar di tengah dan utara. Di Purwakarta juga terdapat Danau Jatiluhur sebagai pembangkit listrik besar pemasok Jawa Bali. Kondisi tersebut terkait dengan sebaran penduduk, sehingga ada daerah-daerah yang aksesibilitasnya rendah dan cenderung berorientasi ke daerah lainnya. Aksesibilitas terbaik adalah jalur Utara-Selatan dan ke arah Subang dan Wanayasa, sedangkan ke arah barat daya seperti Maniis, Tegalwaru dan Sukasari relatif sangat kurang. Tampaknya hal ini berhubungan dengan berbagai status kesejahteraan penduduk di wilayah-wilayah tersebut.

Di Purwakarta berkembang kegiatan-kegiatan industri bersama dengan perkembangan di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Pertimbangan umumnya adalah aksesibilitas ke Jakarta sebagai pusat perdagangan dan outlet perdagangan nasional - internasional. Perkembangan ini cenderung bersifat alami mengikuti aglomerasi kegiatan ekonomi. Umumnya kegiatan ini terjadi di wilayah utara Purwakarta. Problem yang mengikuti perkembangan ini hampir sama dengan daerah lainnya, yaitu penyediaan infrastruktur, *enclave*

dan kurang terkait dengan sumber daya lokal serta polusi. Keberadaan kegiatan semacam ini secara hitungan ekonomi akan mempercepat peningkatan PDRB, namun bisa jadi sangat kurang berdampak pada kesejahteraan penduduk Purwakarta pada umumnya. Karena itu perkembangan-perkembangan seperti itu harus tetap terpantau sekaligus selalu melihat kecenderungan perubahan di DKI Jakarta dan daerah sekitarnya termasuk Bandung, untuk melihat dampaknya pada Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional (Jakarta, Bandung dan Cirebon). Masih banyak wisata lain yang belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Di masa yang akan datang potensi pariwisata di Kabupaten Purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya.

Kabupaten Purwakarta juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang juga sebagai pemasok barang kebutuhan utama di Pasar Induk Bandung dan Jakarta. Kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah dapat di tanami banyak jenis pohon. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat masyarakat pada hamparan wilayah tertentu, misalnya persawahan, perkebunan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan skala ekonomi. Kedekatan dengan pusat-pusat permintaan (*demand*) seperti Jakarta dan Bandung adalah keunggulan geografis Purwakarta. Sektor finansial yang berkembang pesat di Purwakarta dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas ekonomi, namun masalah penjaminan bagi usaha kecil juga penting menjadi perhatian.

Sebagai salah satu daerah tujuan Investasi, Purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. Zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. Momentum potensi investasi ini harus lebih dimanfaatkan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi dengan sektor pembangunan daerah lainnya.

2.2.2 Demografi

Kepadatan penduduk Purwakarta termasuk tidak merata. Penduduk umumnya terkonsentrasi di sekitar wilayah perkotaan dan wilayah Purwakarta bagian utara. Kabupaten Purwakarta memiliki tingkat migrasi masuk yang cukup tinggi. Persebaran penduduk ini cenderung tidak membawa perubahan yang berarti dalam segi strategi pelayanan, sehingga hanya sedikit perubahan situasi-kondisi penduduk pada daerah-daerah seperti Manis, Sukasari, Tegalwaru, Bojong dan sekitarnya. Cakupan-cakupan indikator kesejahteraan umumnya rendah. Sebaliknya pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat

penduduk, cakupan indikator kesejahteraan umum tinggi, namun secara kuantitas jumlah yang kurang sejahtera relatif sangat banyak.

Kondisi ini bisa menjadi dilema bagi upaya peningkatan kesejahteraan, yaitu apakah akan mengatasi penduduk yang bermasalah berdasarkan kuantitas, yaitu yang terfokus pada daerah berpenduduk banyak atau berfokus pada peningkatan cakupan layanan wilayah yang tinggi persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Selain masalah di atas, masalah-masalah sosial juga potensial muncul, misalnya munculnya kehidupan kumuh dan asosial pada daerah-daerah jalur transportasi utama yang potensial memunculkan berbagai penyakit sosial dan keresahan masyarakat. Keamanan dan ketertiban, termasuk kebersihan serta keindahan daerah terkadang menjadi hal yang sulit dipertahankan dalam kondisi seperti di atas.

Sikap-sikap kooperatif penduduk untuk bekerjasama dan memanfaatkan potensinya adalah potensi yang luar biasa. *Stakeholders* juga dapat berperan banyak dalam bekerjasama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada dasarnya masyarakat secara alamiah dan mandiri telah berusaha melakukan aktivitas-aktivitas untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam rangka pemerataan penduduk, dimasa yang akan datang perlu dilakukan upaya-upaya mengembangkan desa pusat pertumbuhan baru dan kawasan-kawasan strategis yang belum dikembangkan secara optimal. Melalui upaya tersebut pola migrasi vertikal penduduk desa ke kota dapat diminimalisir.

2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Sektor pembangunan lainnya yang akan sangat mempengaruhi keseluruhan proses pembangunan daerah adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan 20 tahun ke depan sektor ekonomi menjadi hal fundamental bagi pembangunan daerah dan nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan pembangunan ekonomi secara makro Kabupaten Purwakarta ditandai oleh terjadinya krisis ekonomi nasional pada tahun 1997 yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat secara luas. Dari krisis tersebut terangkat kelemahan mendasar bahwa kemajuan selama ini masih belum didasari oleh peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi nasional dan daerah. Upaya-upaya rescue dan recovery telah dilakukan seoptimal mungkin untuk keluar dari krisis tersebut.

Pembangunan ekonomi Purwakarta 20 tahun mendatang dihadapkan pada tantangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata

peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran.

Struktur ekonomi Purwakarta ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Jasa Lainnya serta Pertanian. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu terus dilakukan dengan didukung upaya-upaya perbaikan manajemen usaha, teknologi dan pasar, karena sektor-sektor tersebut akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Pertanian

Secara umum pembangunan pertanian menunjukkan peningkatan berarti dalam sisi produksi, namun apabila dibandingkan dengan sektor lain kontribusinya terhadap PDRB cenderung menurun. Pembangunan pertanian dalam arti luas atau agribisnis masih dihadapkan pada persoalan hubungan antar sub sistem agribisnis belum sepenuhnya menunjukkan keharmonisan baik pada skala lokal, regional dan nasional; kinerja masing-masing subsistem agribisnis masih rendah, terutama pada subsistem budidaya (*on-farm*) dimana petani dihadapkan pada luasan lahan yang semakin sempit, teknologi masih tradisional, mutu produk rendah, harga tidak mendukung, dan struktur pasar yang cenderung merugikan petani; cara pandang sektoral yang belum terintegrasi pada sistem agribisnis; serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global.

Untuk mempertahankan produktivitas dan produksi pertanian, dimasa yang akan datang perlu dilakukan upaya-upaya penerapan peningkatan teknologi (intensifikasi), perluasan areal pertanian (ekstensifikasi) dan penganekaragaman usaha tani (diversifikasi).

c. Industri

Sektor industri merupakan komponen utama pembangunan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar melalui nilai tambah lapangan kerja dan devisa. Dampak lain dari perkembangan sektor industri juga memberikan peranan yang besar dalam transformasi kultural daerah kearah modernisasi kehidupan masyarakat.

Sektor industri, merupakan sektor yang masih diandalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun dukungan terutama infrastruktur masih belum memadai, salah satunya adalah kebutuhan

terminal yang melayani pergerakan antar daerah maupun internasional dimana pemanfaatannya belum optimal.

Kendala lainnya dalam pengembangan industri antara lain masih tingginya tingkat ketergantungan bahan baku impor yang menyebabkan daya saing industri menurun, rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta pencemaran limbah industri yang masih tinggi.

Guna mengantisipasi hal tersebut, industri di Purwakarta perlu didorong antara lain pengembangan industri jangka panjang yang diarahkan pada penguatan keterkaitan mata rantai industri, peningkatan mutu, peningkatan sumber daya industri, pengembangan infrastruktur, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), pengembangan diversifikasi dan inovasi produk, serta upaya-upaya peningkatan industri berbasis kearifan lokal, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penanggulangan pencemaran lingkungan, sehingga diharapkan industri yang akan dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan.

d. Perdagangan

Adapun sektor ekonomi lainnya adalah sektor perdagangan, dimana Kabupaten Purwakarta mempunyai keunggulan-keunggulan dalam komoditi tertentu dan juga mempunyai kebutuhan barang konsumsi hasil industri yang belum bisa dipenuhi.

Banyak produk-produk unggulan daerah yang belum bisa menembus pasar ekspor, hal tersebut terutama disebabkan karena masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk.

Parasarana pasar tradisional masih sangat terbatas baik jumlah maupun kualitasnya, di sisi lain banyaknya pasar-pasar modern yang masuk ke Kabupaten Purwakarta, yang dikhawatirkan dapat memperlemah daya saing pasar-pasar tradisional.

Pengembangan sektor perdagangan di Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang masih terus difokuskan pada penataan sistem distribusi barang, peningkatan akses pasar, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk, penataan infrastruktur pasar tradisional, dan pengendalian pasar-pasar modern.

e. Pariwisata

Sedangkan untuk pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Purwakarta memiliki potensi pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang sangat besar. Hal ini antara lain disebabkan letak geografis Kabupaten Purwakarta yang sangat strategis. Selain dekat dengan ibukota negara DKI Jakarta dan ibu kota propinsi Bandung yang juga merupakan gerbang masuk wisatawan. Potensi pasar wisatawan

nusantara adalah penduduk daerah-daerah yang berada di sekitar Purwakarta, yaitu DKI Jakarta, Bandung, Bekasi, Karawang, Subang, Banten, Cianjur, dan daerah-daerah sekitar lainnya. Potensi pasar wisatawan nusantara yang begitu besar ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Purwakarta dalam mengembangkan pariwisata yang kompetitif. Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Purwakarta, maka di masa yang akan datang perlu dilakukan penataan produk, objek dan daya tarik wisata khususnya yang berakar pada alam dan budaya Purwakarta, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata, dan pembangunan fasilitas penunjang wisata.

f. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luas wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Purwakarta menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Masalah kemiskinan juga ditandai dengan rendahnya mutu kehidupan masyarakat.

Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan kedepan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan bagi masyarakat miskin.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, sehingga diharapkan pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin terus berkurang dan secara bertahap dapat terpenuhi hak-hak dasarnya.

g. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Masalah-masalah dasar selama ini terutama berkisar pada sempitnya lapangan kerja, lambannya transformasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder, rendahnya kualitas sumber daya penduduk, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Selain itu kondisi ini diperburuk oleh terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) diberbagai perusahaan industri. Disisi lain, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang merupakan kelompok usia produktif.

Untuk menanggulangi masalah-masalah di atas perlu dilakukan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar antara lain dengan mengembangkan fasilitas kawasan dan zona industri, memberikan

kemudahan dalam proses perijinan, mendorong peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dan mengantisipasi dampak sosial dalam masyarakat sekitar industri.

2.2.4 Sosial Budaya Dan Politik

Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia. Untuk itu, titik berat pembangunan sosial budaya, selain berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup manusia dari sudut pandang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi, juga pada terciptanya kualifikasi sumberdaya manusia yang terdidik, yang mampu mengabdikan dirinya kepada keluarga, masyarakat, dan bangsanya, religius, serta bertanggungjawab sebagai subjek pembangunan untuk mencapai kondisi masyarakat dan bangsa yang sejahtera dan berkeadilan.

Dalam kerangka itu prediksi kondisi pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Agama

Pembangunan sektor agama yang berlangsung sepanjang 1984-2006, cenderung masih berorientasi pada pembangunan fisik material, dan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah dalam pengamalan ajaran agama di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, selain terkait dengan pembangunan fisik yang diwujudkan bersama dengan masyarakat, pembangunan sektor agama mesti didorong untuk menciptakan kondisi terbaik bagi berlangsungnya proses pendidikan dan pengamalan nilai-nilai agama di lingkungan keluarga. Bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, dalam proses pembangunan jangka panjang Purwakarta tahun 2005-2025, pengkajian dan aplikasi ajaran agama memperoleh prioritas. Dalam kerangka pembangunan agama, seluruh organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya bertanggungjawab untuk mengembangkan seluruh potensi umat beragama untuk menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional. Terkait dengan hal itu, pengelolaan sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pembangunan sektor keagamaan juga memberi prioritas bagi pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut. Dengan demikian kondisi pembangunan keagamaan di penghujung tahun 2025 mampu memberi ruh bagi semakin mantapnya keimanan, ketakwaan, dan ahlak di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi yang diharapkan tercipta pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Semakin kuatnya toleransi masyarakat dalam menjalankan ibadah keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang kondusif, agamis, tertib, dan sejahtera.

2. Makin kuatnya peranan lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan yang berfungsi memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam perubahan sosial.
3. Rendahnya pelanggaran terhadap etika dan moral keagamaan di lingkungan masyarakat Purwakarta.
4. Semakin mantapnya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan ajaran agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup umat beragama.

b. Pendidikan

Pembangunan pendidikan yang berlangsung sepanjang kurun waktu 1984 - 2006, telah mewujudkan kondisi yang memungkinkan dilakukannya reorientasi tata kelola pendidikan ke masa depan. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, perhatian terhadap pendidikan kejuruan yang memiliki relevansi dengan lapangan pekerjaan, pengembangan pola pemagangan, menjadi faktor yang menentukan dalam menempatkan pendidikan sebagai faktor utama perubahan. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan keharusan yang tak terelakkan. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan lembaga pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, menjadi kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Dalam hal pengembangan sains dan teknologi, terjadi peningkatan kemampuan masyarakat pedesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG).

Pembangunan bidang pendidikan perlu didorong untuk mencapai dimensi kualitatif sumberdaya manusia yang selain memiliki keterampilan berdasarkan pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta moralitas dan juga memiliki komitmen terhadap perkembangan kemajuan masyarakat. Dengan lingkungan dan prasarana pendidikan yang semacam itu, maka seluruh tata kelola pembangunan pendidikan mesti dilihat dari kemampuannya memotivasi, mendorong dan menguatkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak setiap penduduk untuk memenuhi kewajiban insaniahnya.

Hal tersebut mengandung makna, bahwa pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan, dan sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya, pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan berperadaban global. Oleh karena itu, meski secara kuantitatif, pembangunan pendidikan harus mampu memenuhi standar dan ukuran formal pencapaian jenjang pendidikan bagi penduduk melalui pengembangan program wajib belajar 12 tahun, juga harus mampu

menguatkan daya hidup masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dirinya, keluarganya, lingkungan sosialnya, dan masyarakat pada umumnya.

Dengan melakukan pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya, serta penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal, maka pada pembangunan jangka panjang Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 diharapkan terjadi peningkatan indeks pendidikan secara signifikan dengan angka rata-rata lama sekolah yang makin tinggi serta tidak adanya penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta aksara latin.

c. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan yang berlangsung sepanjang tahun 1984 sampai dengan 2006 menunjukkan peningkatan yang dapat dilihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya angka kematian balita, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, serta menurunnya angka kurang gizi pada balita.

Memperhatikan kondisi kesehatan yang ada sampai dengan tahun 2006, dalam kurun waktu tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan lebih didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan terciptanya perilaku dan lingkungan yang sehat berbasis pada kesehatan lingkungan fisik dan sosial yang berhubungan dengan produktivitas penduduk dalam menjalani kehidupan. Untuk mencapai keadaan tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan epidemiologi penyakit, perubahan lingkungan dengan semangat kemitraan. Kemudian juga peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif. Dengan demikian, fenomena pembangunan kesehatan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kesehatan, sebagaimana tercermin sepanjang kurun waktu 1984-2006, perlu didorong kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi dengan keseluruhan tujuan pencapaian kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang. Selain itu juga, kurangnya jumlah penderita sakit di berbagai pusat pelayanan kesehatan serta perubahan paradigma rumah sakit menjadi *hospital* berparadigma sehat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pembangunan kesehatan.

d. Seni dan Budaya

Pembangunan seni dan budaya sepanjang periode 1984-2006 berlangsung sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembangunan seni dan budaya juga dilandasi oleh berbagai kebijakan yang berkait dengan penguatan identitas budaya, melalui pengembangan penggunaan Bahasa daerah Sunda sebagai bahasa ibu masyarakat Purwakarta dalam proses komunikasi dan interaksi kehidupan sehari-hari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan bahasa dan sastra daerah.

Di sisi lain, pengembangan seni budaya di Purwakarta diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana.

Kondisi kebudayaan yang diharapkan terwujud sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan budaya daerah;
2. Tingginya penghargaan dan apresiasi masyarakat terhadap pada bahasa dan budaya daerah, serta semakin kuatnya sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya daerah;
3. Semakin banyaknya ruang publik untuk pertunjukan dan apresiasi seni dan budaya;
4. Semakin mantapnya perlindungan terhadap hak cipta para pelaku seni, bahasa dan budaya daerah.

e. Politik Daerah

Pada jangka panjang, pembangunan politik Purwakarta kurun waktu 2005-2025 diperlukan penyelenggaraan proses komunikasi massa, komunikasi sosial, dan komunikasi politik yang berorientasi pada penyelenggaraan proses demokratisasi yang harmonis. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kualitas pemahaman terhadap fungsi kelembagaan dan media komunikasi. Secara fungsional, kelembagaan dan media komunikasi merupakan bagian integral dari keseluruhan masyarakat, dan karena itu tunduk terhadap dimensi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Baik menyangkut aspek moral, maupun aspek lainnya yang berhubungan dengan penguatan masyarakat di seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

Berdasarkan perkembangan yang berlangsung saat ini, diprediksikan perkembangan dan pemanfaatan teknologi Informasi akan meluas hingga ke perdesaan. Dampak positif yang akan ditimbulkan adalah berkembangnya produktivitas masyarakat, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkannya adalah perubahan orientasi nilai masyarakat dalam menyikapi seluruh perubahan dan pembaruan, terkait dengan tata hubungan sosial budaya mulai dari lingkungan sosial yang terkecil (keluarga) sampai ke masyarakat yang lebih luas. Pembangunan teknologi Informasi digerakkan juga untuk kepentingan pembangunan mental spiritual, untuk mencapai manfaat positif. Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam kehidupan politik merupakan suatu keniscayaan melalui sistem masyarakat madani yang egaliter dan terbuka terhadap perubahan.

2.2.5 Prasarana Dan Sarana Wilayah

Pembangunan infrastruktur wilayah akan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah di masa mendatang. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah diharapkan tidak hanya berfungsi untuk melayani bertambahnya kebutuhan sejalan dengan meningkatnya aktifitas sosial dan ekonomi, tetapi juga agar dapat berfungsi untuk mengarahkan pembangunan wilayah secara proporsional. Untuk itu prediksi kondisi jangka panjang infrastruktur wilayah dapat disajikan sebagai berikut.

a. Transportasi Darat

Kabupaten Purwakarta mempunyai karakteristik kewilayahan yang didominasi oleh daratan, sehingga jaringan transportasi yang melayani pergerakan di dalam wilayah ini adalah jaringan transportasi darat. Jalan menjadi prasarana utama atau tulang punggung (*backbone*) pergerakan jaringan di Purwakarta. Pola struktur jaringan transportasi sampai saat ini dirasakan masih terkonsentrasi pada sebagian wilayah tertentu saja. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan antar bagian wilayah tertentu. Pola struktur seperti ini diantaranya disebabkan oleh besarnya kebutuhan biaya untuk memelihara dan membangun infrastruktur jaringan transportasi. Dimasa yang akan datang jaringan transportasi diusahakan untuk memberikan pelayanan yang efisien. Efisien yang dimaksudkan di sini bahwa jaringan transportasi diusahakan dapat melayani pergerakan orang dan barang dengan pelayanan dan biaya yang optimum. Untuk menghasilkan efisiensi transportasi tersebut diperlukan pengaturan atau hirarki peran serta fungsi jaringan transportasi. Hirarki transportasi ini akan mengintegrasikan skala geografi yang berbeda dari pelayanan transportasi dari regional ke lokal dan sebaliknya.

Pembagian peran dan fungsi ini juga merupakan implementasi dari pelayanan *demand* baik penumpang maupun barang dengan segmen dan jumlah *demand* yang bervariasi. Hirarki jaringan transportasi diharapkan dapat mengakomodasi pelayanan transportasi dari *demand* yang kecil sampai dengan *demand* yang besar. Implementasinya dengan menempatkan simpul-simpul pengumpul dan penyebar di tingkat lokal sampai dengan regional dengan spesifikasi dan karakteristik besar *demand* tertentu. Simpul lokal melayani pergerakan lokal dengan jumlah *demand* yang kecil sedangkan simpul nasional melayani pergerakan regional dan distribusi dari simpul-simpul regional dengan jumlah *demand* yang relatif lebih besar dari simpul regional dan lokal.

Disamping untuk merespon pertumbuhan *demand*, pengembangan jaringan transportasi darat diperlukan juga untuk membuka daerah terisolir dan terbelakang. Dengan demikian, pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

b. Sumber Daya Air dan Irigasi

Tantangan utama ke depan dalam pengembangan sumber daya air adalah meminimalkan terjadinya banjir dan kekeringan akibat ketidakseimbangan ketersediaan air di musim penghujan dan di musim kemarau. Untuk itu, pembangunan sumber daya air diarahkan pada peningkatan upaya konservasi di kawasan lindung; pembangunan infrastruktur penampung air baku yang sekaligus dapat sebagai pengendali banjir seperti waduk, embung dan situ; memasyarakatkan gerakan hemat air; mempertimbangkan ketersediaan air dalam menentukan prioritas pengembangan daerah; serta mengupayakan transfer air antar DAS untuk menyeimbangkan ketersediaan air terutama pada DAS-DAS yang memiliki aktivitas perekonomian tinggi

Prioritas pengembangan keirigasian di masa depan adalah dalam rangka meningkatkan intensitas tanam padi sawah untuk meningkatkan produksi pangan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat khususnya petani dalam pengelolaan jaringan irigasi. Untuk itu perlu dioptimalkan pengelolaan jaringan irigasi serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi.

c. Sarana dan Prasarana Permukiman

Pertumbuhan penduduk, ekonomi dan kemajuan modernisasi tatanan kehidupan masyarakat, akan semakin meningkatkan permintaan akan rumah (dalam skala yang cukup besar). Keterbatasan luas lahan dan tingginya permintaan akan rumah di masa yang akan datang akan menyebabkan semakin tingginya harga rumah pada kawasan tersebut. Dengan demikian, pengembangan model-model penyediaan rumah murah dan pengendalian perkembangan perumahan pada kawasan perkotaan besar dan metropolitan

sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengurangi jumlah *backlog* rumah di Purwakarta tetapi juga untuk mengurangi luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Untuk aspek penyediaan air minum, cakupan pelayanan air minum dan sanitasi baik yang terdapat di kawasan perkotaan maupun perdesaan masih cukup rendah. Pada jangka panjang, sampai dengan tahun 2025 cakupan pelayanan air minum diharapkan telah menjangkau 80% penduduk di kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai dampak dari peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan air minum telah berjalan secara optimal. Dengan demikian, kerjasama pengelolaan air minum antara pemerintah dengan badan usaha dan masyarakat diharapkan telah berlangsung dengan baik.

2.2.6 Pemerintahan Daerah

Optimalisasi manajemen pembangunan daerah adalah salah satu tantangan utama. Dengan struktur organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia yang ada, tampaknya masih diperlukan aparat yang berkualitas, tanggap terhadap permasalahan serta kinerja yang efektif.

Mengingat wilayah Purwakarta yang sangat luas dan penduduknya terpecah-pecah, maka Pemerintah Daerah Purwakarta pada dasarnya menghadapi keterbatasan pelayanan dan keterbatasan rentang kendali manajemen. Ke depan, tenaga-tenaga penggerak ditingkat desa dan kelurahan patut menjadi perhatian yang dapat berfungsi membantu meningkatkan efektifitas manajemen pembangunan daerah.

Potensi lembaga-lembaga teknis Pemerintah Daerah pada dasarnya sangat memadai. Secara teknis dengan demikian lembaga pemerintah akan mampu melayani dan mendorong perkembangan kesejahteraan masyarakat. Secara individual maupun kelembagaan sudah ada yang pernah bekerjasama dan memiliki jaringan kerja yang luas. Secara individual beberapa SDM pemerintah bahkan memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik. Karena itu pada jangka panjang upaya-upaya penguatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat akan dapat difasilitasi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BAB 3

VISI, MISI, ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025

3.1. VISI PEMBANGUNAN

Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Purwakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 adalah:

**PURWAKARTA CERDAS, SEHAT
DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 ini diharapkan akan mewujudkan harapan, keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Purwakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purwakarta tersebut harus dapat diukur guna mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan "Kabupaten Purwakarta sebagai daerah yang cerdas, sehat dan berakhlakul karimah".

Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlak karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purwakarta tersebut dapat diuraikan ke dalam makna-makna berikut ini :

CERDAS

Makna "Cerdas" secara sederhana merupakan pencerminan dari aspek perwujudan : Masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat dan Masyarakat berpendidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian;

1) Masyarakat Berpendidikan dan Berpengetahuan Tinggi

adalah kondisi masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan tinggi serta cepat menyesuaikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Masyarakat Berkeahlian Tinggi

adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai kemampuan serta ahli dalam berbagai hal dengan dilandasi oleh kemampuan interpersonal serta konseptual yang tinggi.

3) Masyarakat Bermoral & Berperikehidupan Sosial Tinggi

adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang bermoral dengan dilandasi oleh norma-norma yang berlaku serta berkepedulian tinggi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

4) Masyarakat yang mampu merespons berbagai perubahan dengan cepat.

Adalah kondisi masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat pada semua aspek, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

5) Masyarakat berpendidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian.

Adalah masyarakat berpendidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian (pengetahuan, keterampilan dan perilaku) dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut setidaknya tercermin dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, bebas buta huruf pada kelompok umur produktif, pendidikan yang merata dan terjangkau serta pendidikan-pendidikan non formal yang dapat menunjang kehidupan masyarakat.

SEHAT

Mewujudkan Purwakarta yang sehat adalah mewujudkan masyarakat yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik; Masyarakat produktif yang mampu bekerja, mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki sistem kesehatan lingkungan yang baik dan merata. Sebagai indikator adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup dan indikator turunan berupa Angka kematian Bayi (AKB) , Angka Kematian Ibu (AKI), tingkat kesakitan, pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan kesehatan.

1. Masyarakat yang Sehat

Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik dengan dilandasi oleh kemampuan hidup layak serta kesadaran dalam menjaga pola hidup sehat. Indikator Masyarakat Purwakarta yang Sehat adalah dengan tercapainya berbagai indikator-indikator Kesehatan yang telah dicanangkan yakni:

- Angka Harapan Hidup (AHH) Tinggi
- Angka Kematian Bayi (AKB) Rendah
- Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan Rendah

2. Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan, merawat serta menjaga Lingkungan yang baik. Masyarakat Purwakarta dengan wawasan lingkungan yang tinggi diharapkan dapat Mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Peduli terhadap lingkungan sekitarnya, Mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang mempunyai Program Terpadu terkait Perlindungan Lingkungan, serta Mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang tanggap, lugas, serta cermat dalam menanggulangi permasalahan Lingkungan yang terjadi.

3. Masyarakat sehat yang mampu melakukan aktivitas.

Adalah mewujudkan masyarakat sehat jasmaniah dan rohaniah yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik, mempunyai jiwa yang kuat serta fisik yang tangguh dalam menjalankan aktivitas produktif dan kreatif dengan didukung oleh kemampuan skill dan konseptual yang memadai mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki sistem kesehatan lingkungan yang baik dan merata.

4. Masyarakat produktif yang mampu bekerja.

Adalah masyarakat yang mampu bekerja (tidak menganggur) pada usia produktif, berprestasi, mempunyai produktifitas tinggi, mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki secara optimal serta mampu dan kreatif dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Mewujudkan Purwakarta yang berakhlakul karimah adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang marhamah, yakni masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, penuh kedamaian, kasih sayang, sejahtera lahir dan batin.

Dalam proses pembangunan, aspek akhlakul karimah sebagai kepribadian masyarakat merupakan unsur intrinsik, unsur filosofis serta semangat pembangunan. Pembangunan Purwakarta yang berkepribadian akhlakul karimah berupaya untuk menggali, memanfaatkan dan mendayagunakan

berbagai semangat, unsur filosofis, yang hakekatnya merupakan kepribadian masyarakat dan daerah secara teritorial. Dengan kata lain, pembangunan Purwakarta berkepribadian akhlakul karimah berupaya untuk menselaraskan/mensinergikan antara pembangunan daerah yang bersifat materi dengan unsur agama dan budaya lokal yang bersifat spiritual (immaterial). Sehingga diharapkan tatanan kehidupan hasil pelaksanaan pembangunan yang dilandasi kekuatan kepribadian akhlakul karimah dapat mewujudkan hasil pembangunan yang sesuai dengan kepribadian masyarakat, yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai pilemburan sebagai *inner local resourches*.

3.2. MISI PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusun **5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025**, yaitu;

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah dengan berbagai upaya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan formal maupun informal, pendidikan umum maupun agama serta didukung oleh aturan atau norma yang mengikat guna mencapai SDM yang berakhlak mulia.

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan menciptakan kesadaran masyarakat yang optimal dalam pola hidup sehat, serta menumbuhkan kembangkan sikap peduli dan menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik di kalangan masyarakat.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal dengan mengembangkan perekonomian yang dapat merangsang pelaku UKM dalam menciptakan karya yang produktif dan kreatif yang berdaya saing. Selain itu mengembangkan potensi dan kemampuan Para Pelaku UKM agar mampu dan memanfaatkan pangsa pasar secara optimal.

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Mewujudkan Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah dengan menyediakan infrastruktur berbasis lokasi atau tempat yang dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung pencapaian tujuan yang diharapkan, serta melakukan peningkatan penataan wilayah secara terpadu.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Perwujudan dari hal diatas dengan menciptakan suatu sistem layanan masyarakat yang terpadu dengan dilandasi oleh konsep *The Right Man*, *The Right Place* dan *The Right Job* guna menghasilkan suatu tata kerja dan tata layanan yang efektif serta efisien. Selain itu dapat menggalakkan suatu bentuk pertanggungjawaban menyeluruh terhadap prosedur pekerjaan secara jujur dengan mengutamakan akuntabilitas yang baik sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

**3.3 ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2005-2025**

3.3.1 Arah Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Sebagai ukuran tercapainya Purwakarta Cerdas, sehat dan berakhlakul karimah dalam 20 tahun mendatang, arah pembangunan dimaksudkan untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok pada setiap misi pembangunan jangka panjang, sebagai berikut :

Misi-1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.

1. Peningkatan Pendidikan dalam Masyarakat beorientasi pada pembuatan berbagai program pendidikan yang bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat. Hal ini didukung dengan berbagai upaya program baik jangka pendek seperti pelatihan pendidikan formal serta informal maupun program pendidikan jangka panjang seperti penancangan program wajib belajar 9, 12 serta 15 Tahun bagi masyarakat.
2. Pelaksanaan program pendidikan dengan mengupayakan arah kebijakan nilai guna tepat sasaran dalam arti tepat tujuan, orientasi serta manfaat. Hal ini diarahkan dengan berbagai upaya seperti melaksanakan berbagai pengawasan, penilaian serta pengevaluasian secara menyeluruh terhadap program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Pembuatan Program pendidikan mempunyai arah acuan dengan melibatkan serta memaksimalkan semua perangkat pendidikan yang ada dari mulai dasar, menengah dan atas. Konsep ini diarahkan dengan berbagai upaya yaitu menuntaskan penanganan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, maupun atas, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB), ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu,

- pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri manufaktur dan agrobisnis berskala regional maupun nasional, pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis penelitian, pengembangan IPTEK dan keunggulan lokal/daerah, serta upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multi media bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan melalui bantuan sarana dan prasarana serta tenaga terdidik sebagai fasilitator pendidikan keterampilan di perdesaan.
4. Peningkatan jiwa religius masyarakat dengan konsep masyarakat yang berakhlakul karimah secara umum diarahkan melalui upaya pembuatan serta pelaksanaan program yang bertujuan menciptakan pribadi masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak dan bertoleransi yang diwujudkan dengan upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan berwawasan agama seperti pengembangan kurikulum baca tulis Al Qur'an serta pemahamannya, memantapkan fungsi dan peran forum-forum keagamaan sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama, implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
 5. Peningkatan kualitas SDM berorientasi pada maksimalnya efektifitas dan efisiensi SDM yang diukur dengan berbagai indikator seperti tingkat kemampuan serta produktivitas dalam bekerja, tingkat potensi ke depan dari SDM, serta tingkat daya saing yang tinggi dari SDM. Indikator tersebut diarahkan dengan berbagai upaya peningkatan program seperti pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan terhadap SDM, pelaksanaan berbagai sertifikasi untuk SDM, peningkatan kompetensi dan daya saing diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal.
 6. Peningkatan kualitas SDM dengan arah kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang diupayakan dengan beberapa program seperti pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara migrasi adalah melalui peningkatan kualitas data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi. pengendalian pertumbuhan penduduk secara alamiah diprioritaskan pada peningkatan akseptor kontrasepsi mantap, pengendalian jumlah penduduk secara alamiah diarahkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin, sedangkan

Misi-2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Peningkatan kualitas Kesehatan Masyarakat diwujudkan dengan pembangunan secara menyeluruh baik program kesehatan, infrastruktur kesehatan, tenaga medis, pendidikan kesehatan. Hal ini diupayakan berdasarkan arah tujuan untuk menanggulangi permasalahan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, untuk memperkuat kualitas dan kapabilitas sistem kesehatan yang dilakukan, serta untuk meningkatkan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.
2. Pelaksanaan masyarakat sehat yang berkualitas dapat diwujudkan dengan berbagai upaya program teknis maupun terstruktur seperti pengembangan puskesmas rawat inap, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan mutu lingkungan perumahan dan permukiman mencakup sanitasi dasar dan sanitasi tempat umum, industri dan tempat lainnya, peningkatan fungsi institusi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan pelayanan kesehatan yang terjangkau, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan lingkungan, dan peningkatan pendidikan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk.
3. Pembangunan aspek lingkungan hidup diorientasikan pada tujuan menyeluruh mengenai pemberdayaan pendidikan lingkungan serta mengenai gerakan memelihara dan menjaga lingkungan hidup. Orientasi ini diharapkan berdampak pada meningkatnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatnya laju pendayagunaan sumber daya alam, meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan penegakan hukum lingkungan.
4. Peningkatan aspek lingkungan hidup diarahkan pada adanya upaya dalam memaksimalkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal.
5. Pemeliharaan dari lingkungan hidup dapat diaplikasikan dengan terus menjaga dan mempertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan

lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.

6. Program peningkatan lingkungan hidup diharapkan dapat berdampak pada pemberdayaan sektor lingkungan hidup dengan memanfaatkan lahan lingkungan oleh pengembangan pertanian berbasis agribisnis.

Misi-3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

1. Peningkatan perekonomian berbasis lokal diupayakan mengarah pada pemberdayaan ekonomi lokal yang maksimal yang menyangkut pada berbagai sektor perekonomian, diantaranya perdagangan, KUKM, dan bisnis.
2. Peningkatan Perekonomian tersebut ini dijalankan oleh berbagai program seperti pada sektor perdagangan yang diarahkan untuk mengoptimalkan pasar tradisional, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk daerah, optimalisasi pemberdayaan sumber daya yang dinilai layak dikembangkan dan produktif dalam menghasilkan output yang manfaat.
3. Peningkatan aspek KUKM dengan memaksimalkan pengembangan struktur ekonomi mikro KUKM yang diharapkan pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi modal KUKM.
4. Pengembangan Perekonomian pada sektor bisnis diarahkan pada aspek kelegalan izin bisnis serta persaingan sehat dalam berbisnis, selain itu adanya pemanfaatan sektor bisnis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif yang berdampak pada pulih dan sehatnya perekonomian.
5. Pengembangan Perekonomian yang berdaya saing diarahkan pada berbagai upaya dalam meningkatkan kekuatan serta kemampuan guna menghadapi berbagai intervensi serta pengaruh yang timbul dari perekonomian luar. Upaya tersebut diantaranya dengan membentuk jaringan kelembagaan pada KUKM untuk mengatasi persaingan global yang dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan.

Misi-4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

1. Pengembangan aspek Infrastruktur diarahkan pada upaya pembangunan berbagai macam infrastruktur guna mendukung dan mendorong peningkatan kinerja serta peningkatan layanan terhadap masyarakat. Arah kebijakan upaya pembangunan infrastruktur

- berlandaskan konsep "asas manfaat" dimana untuk memaksimalkan efisiensi serta efektifitas anggaran.
2. Peningkatan infrastruktur diarahkan dapat berbampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial serta percepatan pengembangan investasi daerah melalui penyiapan area atau wilayah kerja serta dapat memantapkan revitalisasi dan rehabilitasi infrastruktur yang telah ada serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat.
 3. Infrastruktur yang dibuat berdasarkan pada kebutuhan dengan mengutamakan aspek pemerataan pembangunan antar wilayah guna menghindari daerah tertinggal dan daerah terisolasi dengan fasilitas pembangunan yang minim.
 4. Peningkatan Penataan Wilayah yang diarahkan pada perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan yang maksimal sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

Misi-5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan yang bersih diarahkan pada upaya pengembangan dan penggalakkan praktek moral, etika, kode etik serta nilai dalam pemerintahan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
2. Perwujudan Pemerintahan yang bersih diaplikasikan melalui pembangunan bidang pemerintahan yang diarahkan pada kelembagaan terutama pada aspek politik dalam tatanan demokrasi. Aspek politik diarahkan pada pemantapan praktik demokrasi, memperkuat kemitraan dan pengawasan (check and balances) antarlembaga di daerah dan masyarakat madani (civil society) serta pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
3. Penyelenggaraan aparatur yang bersih diarahkan apada upaya penciptaan aparatur yang profesional dengan kemampuan serta kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai dengan pengawasan melekat pada setiap aparatur.
4. Penyelenggaraan aparatur yang bersih diupayakan dengan melaksanakan prosedur penerimaan aparatur secara independen sesuai syarat serta spesifikasi yang harus dipenuhi.

3.3.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Arah Pembangunan Kabupaten Purwakarta, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa berupaya untuk mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan akan berbeda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Setiap sasaran pokok dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan sebagai prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut :

1) RPJMD Ke-1 (2005 - 2008)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan beberapa tahun sebelumnya, RPJMD Ke-I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Purwakarta pasca krisis multidimensi di segala bidang yang melanda Indonesia secara keseluruhan.

Pada tahapan ini, prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada pendidikan dasar sebagai salah satu sasaran utama pembangunan pendidikan dengan target tuntasnya penanganannya Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Tahun 2008.

Pada bidang kesehatan, prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyiapan tenaga kesehatan strategis, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, pengembangan puskesmas dan rumah sakit yang mampu melakukan pertolongan gawat darurat pada persalinan, peningkatan surveilans penyakit dan promosi serta penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media.

Pembangunan di bidang keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antar umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama.

Selanjutnya langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan melakukan dialog-dialog secara berkesinambungan baik antar maupun interumat beragama untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan guna tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan ditandai menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin secara signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pada aspek kependudukan, pada tahapan ini diupayakan tercapainya upaya-upaya pengendalian jumlah penduduk, terutama yang berasal dari faktor tingginya angka kelahiran melalui optimisasi program Keluarga Berencana (KB). Pertambahan penduduk sebagai dampak migrasi masuk, terutama akibat dari perkembangan industrialisasi di Kabupaten Purwakarta, agar tercapai keteraturan secara administrasi kependudukan, perlu dilakukan upaya pengembangan pelayanan administrasi kependudukan, terutama daerah industri dan sekitar daerah industri.

Dalam rangka meningkatkan peran seluruh stakeholder pembangunan yang ada di Kabupaten Purwakarta, pada tahapan ini perlu terus didorong partisipasi seluruh elemen masyarakat, terutama peningkatan peran pemuda dan perempuan pada seluruh komponen kehidupan masyarakat.

Pembangunan bidang pendayagunaan sumber daya lokal pada tahapan ini diprioritaskan pada upaya-upaya mengidentifikasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Purwakarta. Selanjutnya langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, antara lain dengan identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Purwakarta ke depan.

Upaya meningkatkan daya dukung lingkungan, dilakukan melalui perbaikan kepranataan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun pengendalian migrasi, penataan ruang yang mampu mengarahkan pergerakan orang dan barang, antisipasi pertumbuhan wilayah, khususnya kawasan perkotaan, sinkronisasi rencana tata ruang wilayah daerah, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan ke arah yang lebih baik. Kemudian berkaitan dengan ketersediaan air tanah, perlindungan terhadap area resapan air, sebagai wilayah

kantong air perlu terus ditingkatkan dan diawasi oleh semua pihak, termasuk optimalisasi pengawasan dan pengendaliannya dari Pemerintah Daerah.

Pengembangan agribisnis ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan sub sistem agribisnis. Strategi penguatan sistem agribisnis daerah didasarkan kepada kondisi permasalahan faktual pada sistem agribisnis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan. Strategi penguatan sistem agribisnis diharapkan dapat menghantarkan agribisnis pada kondisi ideal dan mampu mewujudkan masyarakat Purwakarta yang sejahtera.

Pembangunan industri manufaktur dilakukan melalui tahapan revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi yang ditandai dengan penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri besar.

Disamping itu, untuk peningkatan sistem perdagangan di Kabupaten Purwakarta pada tahapan ini dilakukan melalui upaya peningkatan akses pemasaran dan sarana distribusi, serta perintisan area-area baru sebagai pusat perdagangan berskala kecil di tingkat kecamatan dan desa, sebagai penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada skala Kabupaten.

Adapun dalam rangka peningkatan Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah kunjungan wisata di Jawa Barat, dilakukan upaya peningkatan dan penataan objek dan daya tarik wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Purwakarta, peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata serta upaya promosi pariwisata daerah pada berbagai even dan media.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dilakukan melalui tahap penyiapan pranata KUKM melalui peningkatan kapasitas SDM KUKM, perkuatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUKM pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam tahapan pelaksanaan implementasinya.

Pada aspek infrastruktur wilayah, pengembangan infrastruktur wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah. Pada tahap ini diarahkan pada persiapan pranata pendukung pengembangan

infrastruktur wilayah berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur yang telah ada serta persiapan pembangunan infrastruktur baru. Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong guna meningkatkan akses keterhubungan antar wilayah, antar permukiman perdesaan dan perkotaan, serta infrastruktur yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Pada aspek tata pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbebas dari tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya asas pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Pada aspek pembangunan politik daerah, pada tahapan ini diarahkan guna terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam kehidupan politik, pemerintahan dan pembangunan daerah. Guna kearah tersebut dilakukan upaya optimalisasi peran ormas, LSM, dan Partai Politik, sebagai wadah/lembaga penyalur aspirasi masyarakat (kelompok masyarakat terorganisir).

Pembangunan pada aspek hukum, pada RPJMD tahap ke-1 ini diarahkan melalui upaya pengembangan produk hukum daerah. Produk-produk hukum yang telah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi saat ini, perlu dilakukan deregulasi untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimum, diperlukan kondisi daerah yang aman, tertib dan tentram. Guna mewujudkan Kabupaten Purwakarta yang aman, tertib dan tentram, pada tahapan ini diarahkan melalui upaya pengembangan peran serta dan partisipasi segenap masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara swakarsa mandiri, dan selain itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan bersih dari KKN, maka perlu peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui upaya penerapan pola *Reward* dan *Punishment*.

2) RPJMD Ke-2 (2008 - 2013)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1, RPJMD tahap ke-2 ditujukan untuk

meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat. Fokus pembangunan masyarakat Purwakarta yang cerdas dan berkarakter dalam kurun waktu 2008-2013, diarahkan kepada aspek-aspek sebagai berikut :

Prioritas pembangunan pendidikan pada tahapan ini diarahkan kepada upaya pengembangan pendidikan gratis bagi penduduk miskin. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pada saat ini pendidikan merupakan syarat dalam meningkatkan kualitas SDM, dimana pendidikan berperan sebagai salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Sehingga oleh karenanya pembangunan pendidikan di daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk terhadap penduduk yang tidak beruntung pada sisi ekonomi atau berkategori miskin. Faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja untuk ikut membantu ekonomi keluarga. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan tingkat pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Masyarakat miskin masih menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Atas dasar kenyataan tersebut, langkah strategis sebagai solusi serta perhatian yang lebih terhadap kondisi pendidikan masyarakat miskin di Kabupaten Purwakarta, yaitu melalui Pendidikan Gratis Bagi Penduduk Miskin.

Selanjutnya, guna menanggulangi kesulitan peserta didik memperoleh buku sebagai bahan bacaan, pada tahapan ini akan ditempuh upaya pembebasan pembelian buku sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Pada aspek kesehatan merupakan tindak lanjut dari RPJMD sebelumnya. Pada tahapan ini strateginya berupa pengembangan puskesmas rawat inap. Upaya tersebut dalam rangka menanggulangi permasalahan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Sehingga guna lebih mendekatkan layanan kesehatan masyarakat, Puskesmas-Puskesmas tertentu yang memenuhi syarat pada tahapan

ini secara bertahap akan didorong agar mampu memberikan layanan rawat inap.

Sedangkan fokus pembangunan keagamaan, pada tahapan ini diprioritaskan pada upaya pengembangan kurikulum baca tulis Al Qur'an. Penanaman nilai-nilai agama sebagai kekuatan lokal kepada masyarakat terutama anak usia sekolah harus dilakukan. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik sampai dengan saat ini masih dinilai belum memuaskan. Pada sisi yang lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal pada pelatihan peningkatan ketrampilan serta membangun jiwa wirausaha dibarengi kemampuan manajemen pengelolaan usaha calon tenaga kerja. Dalam upaya menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja dan harmonisasi dalam lingkungan kerja, diimplementasikannya pelaksanaan hubungan industrial berdasarkan norma dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk secara alamiah diprioritaskan pada peningkatan akseptor kontrasepsi mantap, sedangkan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dari segi mobilitas penduduk melalui penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam rangka hal tersebut, terutama guna penataan pelayanan administrasi kependudukan dalam bentuk layanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan layanan kependudukan lainnya, pada tahapan dilakukan upaya pemberian pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan layanan kependudukan lainnya secara Gratis Penuh bagi seluruh masyarakat, dengan pusat layanan di Desa dan Kelurahan.

Pengembangan kesadaran dan peran masyarakat, pada tahapan ini lebih dititikberatkan pada upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur alokasi peranan, atribut, stereotip, hak,

kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. Marginalisasi, diskriminasi dan sub-ordinasi terhadap kaum perempuan membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat lemah. Kombinasi kendala ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang dihadapi oleh perempuan menyebabkan terjadinya kemiskinan perempuan (*feminization of poverty*). Lemahnya akses perempuan terhadap partisipasi pembangunan terkait pada akses pendidikan, status ekonomi serta minimnya peluang partisipasi mereka dalam penentuan keputusan.

Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta laju pendayagunaan sumber daya alam dapat pulih sebanding dengan pembuangan limbah ke lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya yaitu terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mengembangkan kearifan lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*), meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan penegakan hukum lingkungan.

Pengembangan agribisnis di Kabupaten Purwakarta pada tahap RPJM kedua dimulai dengan penataan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di setiap subsistem agribisnis. Dari segi sistem agribisnis yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah: (1) penataan agribisnis yang ada, (2) perbaikan subsistem agribisnis yang bermasalah, (3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, (4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam struktur PDRB Kabupaten Purwakarta, dan (5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis. Revitalisasi agribisnis dalam kerangka pembangunan ekonomi Kabupaten

Purwakarta terkait dengan koreksi, pemantapan, dan pengembangan, kebijakan yang telah dibuat. Koreksi dilakukan untuk menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem yang lebih luas, bukan hanya identik dengan sektor pertanian primer. Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumber daya ekonomi yang lebih berat ke pengembangan agribisnis.

Pada sektor perdagangan, pada RPJMD tahap ke-2 ini lebih diarahkan untuk mengoptimalkan pasar tradisional, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk daerah. Dalam rangka membangun sektor perdagangan, perlindungan terhadap pasar perlu terus dilakukan, terutama pasar-pasar tradisional yang tersebar di beberapa Kecamatan. Pasar-pasar tradisional tersebut, perlu dikembangkan dan dioptimumkan peran dan fungsinya, terutama dalam rangka dinamisasi ekonomi perdesaan.

Pada tahapan ini, Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada upaya peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Purwakarta yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar regional dan nasional.

Pembangunan KUKM pada tahapan ini dilakukan upaya optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha untuk mengakselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. KUKM diharapkan dapat menjadi andalan dan pendukung dalam penyediaan tenaga kerja. KUKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan dalam lingkup regional dan nasional.

Bidang investasi daerah, pada tahapan ke-2 RPJMD ini diarahkan pada upaya pengembangan investasi daerah melalui penyiapan area/zona industri melalui sistem sewa kepada Pemerintah Daerah baik dalam bentuk lahan terbuka maupun Kawasan Siap Bangun (KASIBA). Melalui pola ini diharapkan dapat tercapai pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan investor,

serta menjadi faktor penarik masuknya investasi ke wilayah Purwakarta (Insentif investasi).

Pada aspek infrastruktur wilayah, diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya yaitu memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas untuk pergerakan orang, barang, dan jasa, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, meningkatnya layanan jaringan irigasi, meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi, serta meningkatnya ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi lingkungan.

Pada aspek pengembangan wilayah, pada tahapan ke-2 RPJMD ini diarahkan melalui pengembangan daerah-daerah perbatasan kabupaten. Daerah-daerah perbatasan karena letaknya cukup strategis yaitu sebagai pintu gerbang Purwakarta, perlu mendapat perhatian dan penanganan. Pada aspek ekonomi, wilayah perbatasan tersebut dapat mendatangkan potensi untuk dikembangkan menjadi pusat area ekonomi. Guna menuju ke arah tersebut, infrastruktur dan tata ruang wilayahnya perlu ditata dengan baik, agar wilayah daerah perbatasan dapat tampil sebagai area yang unik, berkarakter dan khas.

Perluasan pengembangan wilayah perkotaan pada jangka panjang akan didorong melalui upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama di kecamatan-kecamatan yang berada pada area sub urban, seperti : Kecamatan Campaka, Babakancikao, Bungursari, Jatiluhur, dan Pasawahan.

Pada aspek penataan ruang wilayah, pada tahapan ini diarahkan guna menata ruang kota dan perdesaan serta aspek-aspek pendukung lainnya. Tata ruang kota Kabupaten dan tata bangunan gedung pemerintah dan masyarakat akan diarahkan agar dapat menunjukkan karakter lokal Purwakarta. Bangunan-bangunan tua yang selama ini ada, perlu ditata dan diperindah. Halaman Stasiun Purwakarta sebagai warisan sejarah, ke depan akan dikembalikan kepada kondisi semula, sehingga dapat menunjukkan kondisi tempo dulu Purwakarta. Selanjutnya aspek-aspek wilayah lainnya seperti Kawasan Situ Buleud, Alun-Alun, dan Bangunan Pemerintah Daerah akan ditata, sesuai dengan karakter lokal Purwakarta. Tampilan wilayah mulai dari kondisi jalan, taman kota, bentuk bangunan pemerintah, bangunan perumahan masyarakat, sarana publik,

kehidupan sosial masyarakat dan aspek-aspek lainnya, pada tahapan ini secara bertahap akan ditata agar dapat menunjukkan karakter dan budaya lokal Purwakarta (*identity factor*).

Dalam rangka penataan lingkungan permukiman, pada RPJMD tahap ke-2 ini perlu dilakukan penentuan dan penataan kembali area permukiman. Perencanaan tata ruang permukiman baru dalam bentuk proses penentuan dan penataan kembali tata ruang permukiman yang ada dalam bentuk proses penataan kembali, dimaksudkan guna mewujudkan kondisi ruang permukiman yang tertata, serasi dan berorientasi fungsi. Pada tahap ini diharapkan kondisi keruangan wilayah Kabupaten Purwakarta dapat tertata dengan teratur, serasi pada aspek tata dan fungsi serta memiliki jaringan infrastruktur wilayah yang lengkap.

Selain itu pada tahapan ini pembangunan di kawasan perkotaan menjadi lebih teratur dengan dukungan perangkat manajemen perkotaan yang dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan yang ada. Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik yang ditandai dengan dilaksanakannya RTRW Kabupaten Purwakarta dan ditindaklanjutinya RTRW ke dalam rencana tata ruang yang lebih rinci serta terjalinnya koordinasi dalam konteks pembinaan dan pengawasan tata ruang antara kabupaten dengan kecamatan dan desa/kelurahan maupun antara kabupaten dengan propinsi dan nasional.

Pada tahapan ini, pembangunan aspek politik diarahkan pada membangun konsensus antar stakeholders untuk mewujudkan demokrasi sebagai satu-satunya aturan main dalam pemerintahan.

Pembangunan aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada konsolidasi personil, aturan, dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pembangunan aspek hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan aspek aparatur diarahkan pada penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, dan penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap kedua merupakan prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan bidang lainnya. Karena itu pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada penyiapan pranata baik politik, hukum, ketertiban umum dan

aparatur yang dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi jangka panjang Kabupaten Purwakarta.

Pada aspek optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pada RPJMD tahap ke-2 diarahkan melalui upaya pemberian insentif penghasilan berbasis kinerja bagi Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas/Hansip, Kadus, RW, dan RT, dengan besaran insentif kinerja sesuai dengan kemampuan dan daya dukung anggaran daerah.

3) RPJMD Ke-3 (2013 – 2018)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, RPJMD tahap ke-3 ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Purwakarta dalam segala bidang. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Purwakarta terhadap pembangunan regional Jawa Barat dan nasional.

Fokus pembangunan pada RPJMD tahap ke-3 pada bidang pendidikan yaitu akselerasi penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung akselerasi tersebut yaitu tuntasnya penanganan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui pembangunan unit sekolah baru (USB), rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB) serta ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih merupakan sasaran prioritas pada periode ini, dengan target tertampungnya semua anak usia 0 – 6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal. Adapun pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri manufaktur dan agrobisnis berskala regional maupun nasional, dan Pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis penelitian, pengembangan IPTEK dan keunggulan lokal/daerah. Pada periode ini juga dilakukan upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multi media bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan melalui bantuan sarana dan prasarana serta tenaga terdidik sebagai fasilitator pendidikan keterampilan di perdesaan.

Fokus pembangunan masyarakat untuk pembangunan bidang kesehatan, pada tahapan ini sasarannya adalah untuk memperkuat kualitas dan kapabilitas sistem kesehatan yang dilakukan dengan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Adapun kemudahan akses pelayanan

kesehatan dilakukan strategi penempatan dokter dan bidan desa atau tenaga kesehatan terampil lain pada seluruh daerah di Kabupaten Purwakarta. Pada tahap ini fasilitas kesehatan di Kabupaten Purwakarta harus mampu secara mandiri untuk mengatasi segala persoalan kesehatan masyarakat. Strategi peningkatan mutu lingkungan perumahan dan permukiman mencakup sanitasi dasar dan sanitasi tempat umum, industri dan tempat lainnya untuk mewaspadaikan secara dini munculnya berbagai penyakit. Guna mencapai kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih dilakukan strategi melalui peningkatan promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media.

Pembangunan bidang keagamaan di Purwakarta diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran forum-forum keagamaan sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan merevitalisasi dan mengevaluasi peran dan fungsi forum-forum keagamaan sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.

Pada RPJMD tahap ke-3, pembangunan mulai dikonsentrasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan upaya pengurangan jumlah pengangguran. Pada tahap ini diperkirakan aspek ekonomi akan menjadi penggerak seluruh tatanan kehidupan masyarakat, oleh karenanya upaya penyalapan tenaga kerja yang siap pakai melalui pendekatan penyediaan sekolah-sekolah berbasis kompetensi dan kewilayahan mutlak harus dilakukan. Di desa-desa mulai dibentuk sekolah kejuruan pertanian, dengan harapan para lulusannya dapat menjadi katalisator, motivator dan dinamisator pengembangan sektor agribisnis perdesaan. Demikian juga di daerah perkotaan, sekolah-sekolah kejuruan berbasis teknologi dan sistem informasi, sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pasar harus sudah mulai dikembangkan. Melalui pendekatan demikian, diharapkan jumlah pengangguran dapat berkurang, dengan asumsi kondisi ekonomi daerah dan laju investasi daerah pada periode tahapan ini dapat berjalan secara sehat.

Pada periode ini pengendalian jumlah penduduk secara alamiah diarahkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin, sedangkan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara migrasi adalah melalui pemantapan dan pengendalian penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan.

Pada tahapan ini diprediksikan jumlah penyandang masalah sosial sebagai akibat dari perkembangan tatanan ekonomi daerah akan mengalami peningkatan. Pada tahapan ini disparitas ekonomi antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah akan besar sekali, sehingga diperlukan upaya pengembangan kesadaran dan peran masyarakat untuk ikut peduli terhadap permasalahan-permasalahan sosial.

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya lokal, perhatian utama diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Purwakarta. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan arus globalisasi.

Daya dukung lingkungan daerah yang mantap dicerminkan oleh proses penataan ruang yang mampu mewadahi jumlah penduduk, persebaran dan aktivitasnya, serta pertumbuhan wilayah sub urban dan perdesaan, secara seimbang sesuai daya tampungnya, meningkatnya potensi sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup, menciptakan kemandirian dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar serasi dengan daya dukung lingkungan. Indikasinya adalah meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal. Sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang semakin berkembang serta sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan yang semakin lengkap dan memadai. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan, menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, semakin efektifnya upaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan

Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik dengan meningkatnya implementasi pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan semakin mantapnya sistem pengendalian.

Pada tahap ini pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada pelembagaan terutama pada aspek politik melalui pelembagaan demokrasi yang menjunjung etika. Pembangunan Aspek Hukum diarahkan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan Aspek Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada pelembagaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pembangunan aspek aparatur diarahkan pada peningkatan profesionalitas aparatur yang didukung standar prosedur operasional dan tata laksana serta kompetensi yang memadai dan berbasis pelayanan.

4) RPJMD Ke-4 (2018 - 2023)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD tahap ke-4 ditujukan untuk mencapai keunggulan masyarakat Purwakarta dalam segala bidang dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kabupaten Purwakarta memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Kabupaten Purwakarta relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Purwakarta terhadap pembangunan Regional Jawa Barat juga relatif lebih tinggi daripada kabupaten/kota lain.

Perhatian bidang pendidikan pada periode 2018-2023 adalah target akselerasi penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya memasuki saat-saat menentukan pada periode ini. Upaya - upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala regional dan nasional. Upaya tersebut

dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum nasional dan internasional. Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah diperoleh.

Fokus pembangunan kurun 2018-2023 pada aspek kesehatan diutamakan pada peran serta dan partisipasi masyarakat dan penguatan institusi dalam peningkatan kesehatan, yaitu peningkatan fungsi institusi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan pelayanan kesehatan yang terjangkau, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan lingkungan, dan peningkatan pendidikan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Pembangunan bidang keagamaan pada tahapan ini diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran forum-forum keagamaan sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagi segi kehidupan. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan meningkatkan fungsi dan peran forum keagamaan sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk perluasan sarana, prasarana dan kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal pada pelatihan peningkatan ketrampilan serta membangun jiwa wirausaha dibarengi kemampuan manajemen pengelolaan usaha calon tenaga kerja. Dalam upaya menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja dan harmonisasi dalam

lingkungan kerja, ditumbuhkembangkan pelaksanaan hubungan Industrial berdasarkan norma yang berlaku.

Dari segi pengendalian jumlah penduduk secara alamiah diarahkan pada pemberdayaan keluarga, sedangkan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara migrasi adalah melalui peningkatan kualitas data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan yang terintegarsi.

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Purwakarta pada periode tahapan ini unggul dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, pada aspek pengembangan kesadaran dan peran masyarakat perlu terus dioptimumkan, tidak hanya terbatas kepada kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang sedang di hadapi pemerintah daerah. Pada tahapan ini perlu pula dikembangkan kesadaran dan peran masyarakat untuk turut serta memikirkan dan melakukan hal-hal lain dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya lokal, pada periode ini perhatian lebih diupayakan melalui penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Purwakarta. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jatidiri masyarakat Purwakarta.

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan daerah, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui meningkatnya perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan dengan memberikan nilai tambah terhadap potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup serta mengembangkan substitusi pemanfaatan sumber daya alam.

Pada tahap ini, pengembangan agribisnis harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas, terutama pada wilayah regional Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis. Untuk itu diperlukan:

- (1).Perusahaan induk (*Holding Company*) dan integrasi vertikal

tingkat lokal, regional, dan internasional, (2).Kolaborasi bisnis, dan (3).Relasi bisnis. Pada tahap ini agribisnis Kabupaten Purwakarta sudah berkembang menembus batas-batas wilayah, sehingga sebagai konsekuensinya adalah pada tahap ini persaingan global di bidang agribisnis akan semakin kuat. Berdasarkan potensi yang ada, daerah-daerah yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta secara umum merupakan penghasil produk agro. Pada RPJMD tahap ke-4, komoditi-komoditi agro unggulan spesifik lokal yang dihasilkan oleh daerah-daerah di Kabupaten Purwakarta harus terus dikembangkan, dikemas dan ditata aspek pemasaran dan distribusinya. Diharapkan Kabupaten Purwakarta memiliki produk unggulan lokal yang berstandar nasional dan internasional.

Pada aspek industri dan perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi serta perluasan jaringan perdagangan daerah.

Sementara itu, pada aspek pariwisata, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata.

Pada tahapan ini, pengembangan KUKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUKM. Pada tahap ini KUKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan regional, nasional dan internasional.

Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai dengan lebih mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Kabupaten Purwakarta semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya.

Pada tahapan ini, kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan rencana tata ruang sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud. Hal ini ditandai dengan tercapainya alokasi ruang kawasan lindung dan terjaminnya lahan untuk sawah serta tersedianya alokasi ruang di kawasan perkotaan untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas perkotaan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada pemantapan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Sedangkan aspek hukum pada tahapan ini diarahkan guna pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan.

Pada tahap ini pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada pemantapan capaian pada tahap ketiga. Aspek politik diarahkan pada pemantapan praktik demokrasi, memperkuat kemitraan dan pengawasan (*check and balances*) antarlembaga di daerah dan masyarakat madani (*civil society*) serta pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Aspek Aparatur diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan standar pelayanan yang teruji.

5) RPJMD Ke-5 (2023 - 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-4, RPJMD tahap ke-5 atau RPJMD tahap terakhir, ditujukan untuk mempertahankan keunggulan Kabupaten Purwakarta sehingga kesejahteraan masyarakat memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin meningkat.

Pemantapan pembangunan di bidang pendidikan diawali dengan rintisan Program Wajib Belajar Lima Belas Tahun pada periode sebelumnya. Upaya - upaya yang terus dilakukan dalam rangka penancangan tersebut yaitu pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah menengah kejuruan bertaraf nasional dan internasional yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global, yang didukung oleh pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.

Fokus memantapkan pembangunan bidang kesehatan pada tahapan ini dilakukan upaya penguatan sistem kesehatan dengan

strategi diarahkan pada kemandirian masyarakat pada pelayanan kesehatan, dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan secara prapaya. Sasaran-sasaran akses layanan, kewaspadaan dini terhadap penyakit dan kesadaran hidup sehat dan bersih strateginya diarahkan pada meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, pemberian *rewards* dan *punishment* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Pembangunan bidang keagamaan diprioritaskan pada upaya pemantapan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan mengoptimalkan fungsi dan peran forum-forum keagamaan daerah sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal pada pelatihan peningkatan ketrampilan serta membangun jiwa wirausaha dibarengi kemampuan manajemen pengelolaan usaha calon tenaga kerja. Dalam upaya menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja dan harmonisasi dalam lingkungan kerja, pemantapan pembudayaan pelaksanaan hubungan industrial berdasarkan norma yang berlaku.

Dari segi pengendalian jumlah penduduk secara alamiah diarahkan untuk mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, sedangkan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara migrasi adalah mengarahkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengembangan ekonomi yang sesuai dengan potensi daerah serta peningkatan penggunaan data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan sebagai dasar acuan pembangunan.

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya lokal, pada tahapan ini lebih diprioritaskan pada upaya pemantapan Ketahanan Budaya dalam kehidupan global. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan menjadikan budaya lokal daerah, termasuk nilai-

nilai luhur yang dikandungnya, sebagai bagian dari interaksi sosial masyarakat dalam pergaulan masyarakat berskala regional, nasional maupun internasional.

Kemantapan daya dukung lingkungan daerah harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pada tahapan ini upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.

Pembangunan aspek agribisnis pada tahap ini harus sudah memasuki tahap pemenangan persaingan, terutama pada area regional Jawa Barat. Untuk itu diperlukan: (1).Penguatan keunggulan kompetitif, (2).Terpenuhinya konsumsi produksi, (3).Tingginya daya terima pasar terhadap produk agro yang dihasilkan, dan (4).Nilai tambah ekspor yang tinggi. Kegiatan agribisnis pada tahap ini dicirikan dengan komitmen yang tinggi terhadap tujuan memenangkan keunggulan kompetitif di regional dan nasional, dengan ciri bisnis yang berorientasi pada efisiensi, kualitas, keamanan dan keberlanjutan.

Pada aspek industri dan perdagangan, pada tahapan ini diarahkan guna penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbaharukan, penanganan industri ramah lingkungan dan penguatan jaringan antar industri. Adapun pada sektor perdagangan, di arahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.

Pada tahapan ini pariwisata diarahkan untuk keberlanjutan pariwisata, melalui pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan baik sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pariwisata. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata harus mendukung upaya konservasi/preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dukungan spesifik daerah.

Aspek pengembangan KUKM, pada periode tahap ke-5 RPJMD diarahkan melalui pemantapan KUKM dengan peningkatan daya saing KUKM, pengembangan struktur ekonomi KUKM serta penyerapan tenaga kerja dan investasi bidang KUKM.

Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada mempertahankan kemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah serta kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai dengan tersedianya jaringan infrastruktur transportasi handal dan terintegrasi, mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat. Pada tahap ini, aspek infrastruktur merupakan tahap pemeliharaan dan pengembangan, dengan asumsi semua aspek infrastruktur wilayah telah mencapai tahap optimum dan mantap, baik rasio, persebaran maupun kualitasnya.

Sementara itu dalam aspek pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Purwakarta, pada tahap ini diharapkan tidak terdapat lagi daerah terisolasi dengan fasilitas pembangunan yang minim.

Pada aspek tata ruang, pada tahapan ini diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta telah menikmati sarana perumahan dan prasarana dasar penunjangnya. Sarana dan prasarana transportasi darat telah menjangkau ke seluruh desa. Seluruh desa telah dapat mengakses informasi dan telah terlayani oleh sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dengan standard nasional.

Pada tahapan ini, aspek hukum diarahkan pada perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada aspek politik diarahkan pada konsolidasi demokrasi dengan semua stakeholders dapat menerima demokrasi dan menjalankannya dalam praktik politik. Sedangkan aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada pemeliharaan kondisi yang telah dicapai dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram.

Sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik pada tahap ini merupakan tahap pemeliharaan dan pengembangan dengan asumsi semua aspek pembangunan dalam Bidang Pemerintahan telah mencapai tahap melembaga dan mantap. Sesuai dengan cita-cita pemerintahan, pada RPJMD tahap ke-5, tatanan kehidupan dan urusan/kewenangan yang semula menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, harus sudah mulai diserahkan penyelenggaraannya kepada masyarakat dan lembaga swasta. Sehingga adagium "pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang sedikit memerintah" (*good govern is less govern*) di Kabupaten

Purwakarta pada RPJMD tahap ke-5 dapat terwujud. Pada tahap ini, sektor-sektor swasta dan masyarakat mulai mendorong agar mampu menjalankan fungsi-fungsi layanan publik, Pemerintah Daerah hanya berperan sebagai fasilitator, jejaring koordinasi dan penyedia regulasi.



BAB IV PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang adalah pedoman bagi Pemerintah dan Masyarakat Purwakarta dalam penyelenggaraan pembangunan.

RPJP ini menjadi arah dan pedoman di dalam dan di luar Kabupaten Purwakarta dalam jangka menengah daerah (RPJMD) dan tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi global dan persaingan regional, didukung oleh aspek:

1. Kemandirian dan kemandirian
2. Kemandirian kemandirian
3. Kemandirian dengan daya
4. Berorientasi dan berorientasi
5. Peran serta masyarakat



Perda RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025

BAB IV

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang adalah pedoman bagi Pemerintah dan Masyarakat Purwakarta dalam penyelenggaraan pembangunan.

RPJP ini menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan Purwakarta Cerdas, sehat dan berakhlakul Karimah, sebagai Visi Jangka Panjang Pembangunan Purwakarta perlu didukung oleh aspek :

1. Komitmen dan kepemimpinan daerah yang kuat, kreatif, strategik dan demokratis.
2. Konsistensi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Kerjasama dengan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Barat.
4. Berorientasi dan berpihak pada rakyat.
5. Peran serta masyarakat dan unsur stakeholder Purwakarta secara aktif.

